

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN
PERUMAHAN
NUSA TENGGA II**



Hapernas 2023, Menteri Basuki Apresiasi

Kolaborasi dalam Wujudkan Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan untuk Semua



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun untuk melaporkan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR dan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2020-2024 serta

Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 adalah hasil kontribusi dari satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan penyelenggaraan perumahan yang dibangun dan selesai pada tahun 2023 ini, dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II kepada pihak yang berkepentingan. Semoga ke depan, kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kupang, 12 Januari 2024
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II



Yuliana D. Bunga, ST., MT
NIP. 197005221999032003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II pada tahun 2020-2024 turut serta dalam rangka mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020-2024 untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dengan indikator kinerja antara lain : (a) Pemenuhan Jumlah Laporan Penyusunan Penyediaan Perumahan, (b) Pemenuhan Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, (c) Pemenuhan Jumlah Rumah Susun yang dibangun, (d) Pemenuhan Jumlah Rumah Khusus yang dibangun serta (e) Pemenuhan layanan bantuan PSU untuk Rumah MBR.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II merupakan output kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni. Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman, dan Sasaran Strategis 3 (SS3) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu *Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau*.

Tabel 1. Target dan Capaian Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	OUTPUT KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
Indikator Kinerja			
1	Jumlah Laporan Penyusunan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	4 Laporan
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	845 Unit	844 Unit
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	103 Unit	103 Unit
4	Jumlah Rusun yang dipelihara	7 Tower	7 Tower
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	*2100 Unit	*MYC 2023-2024
6	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1100	1168
TOTAL			

Selain melaksanakan kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni", Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II juga melaksanakan kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan "Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan", Sasaran Program Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, dan Sasaran Strategis 5 (SS-5) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan ini terdiri atas Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran.

Tabel 2. Target & Capaian Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	OUTPUT KEGIATAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan		
Indikator Kinerja		
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
3	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan
TOTAL		

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan komitmen yang telah diperjanjikan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II kepada Direktur Jenderal Perumahan, dialokasikan anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 4.654.094.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah)** sedangkan anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 497.631.301.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).**

Tabel 3. Realisasi Anggaran

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI (Rp. Ribu)	REALISASI	
				Keuangan	Fisik
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	4.654.094	4.615.094	99.17%	100%
2	Satker Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Timur *)	497.631.301	293.467.178	58.97%	69.06%

*)adanya paket kontrak dengan skema MYC 2022-2023 untuk Paket I,II,III dan Konsultan MK pada Paket Pembangunan Rumah Khusus bagi warga pejuang timor timur tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir desember 2023 karena Land Development oleh Ditjen CK tidak mencapai target 100% sehingga diperpanjang dengan skema MYC 2023-2024



BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN PERUMAHAN
NUSA TENGGARA II mengucapkan

**SELAMAT
HARI BAKTI PU Ke-78**

Yublina Dila Bunga, S.T., M.T.

Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II



BalaiPerumahan Ntt



pupr_perumahan_nt2



PUPR_Perumahan_NTT



BalaiPerumahan Ntt



pupr_perumahan_nt2



PUPR_Perumahan_NTT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tugas Dan Fungsi	8
1.3 Susunan Organisasi	9
1.4 Isu Strategis	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Uraian Singkat Renstra	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
2.3 Metode Pengukuran	20
2.4 Target tahun ini menurut Renstra	21
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	23
3.1 Sumber Daya Manusia	23
3.2 Sarana dan Prasarana	27
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	29
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	36
4.1 Capaian Kinerja Balai	36
4.2 Perbandingan Kinerja Balai	84
4.3 Realisasi Anggaran	87
BAB V. PENUTUP	90
LAMPIRAN	93

Bimbingan Teknis

Rumah Umum dan Komersial (RUK)

/ Program Sejuta Rumah (PSR)

Provinsi NTT Tahun 2023



KEMENTERIAN PUPR
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

BIMBINGAN TEKNIS

RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL (RUK) / PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR) T.A. 2023

Kupang 19 Oktober 2023



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam upaya mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan laporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja serta pemacu adanya peningkatan kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2022 adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 ini, merupakan laporan realisasi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2020 – 2024.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020, Balai P2P mempunyai tugas melaksanakan pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya (ruswa), prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), koordinasi dukungan penanggulangan bencana serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai P2P menyelenggarakan fungsi:

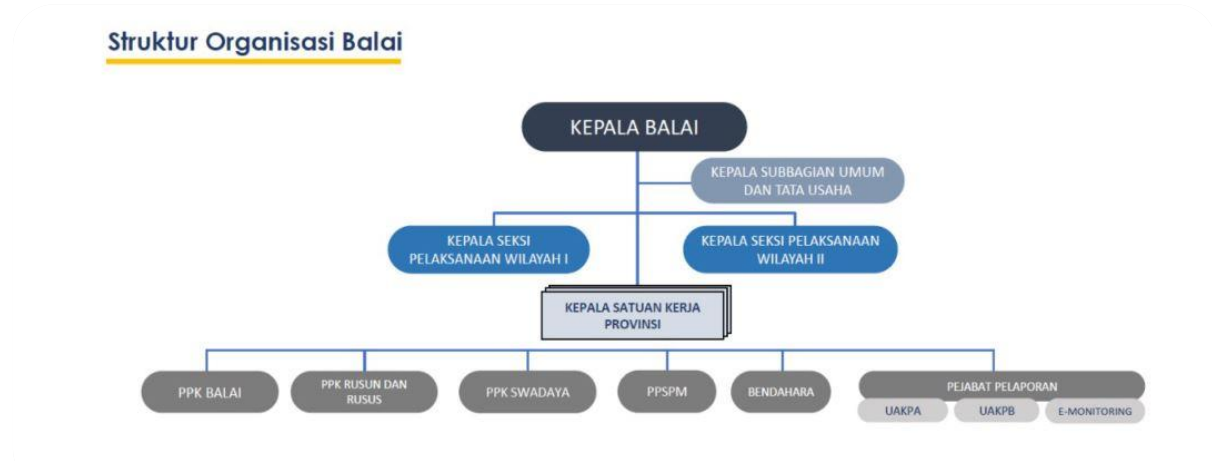
1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;

3. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
7. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
8. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian PUPR, Secara struktur, Balai P2P dipimpin oleh Kepala Balai (Pejabat Administrator) dengan dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha (Kasubbag. TU), Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II.

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terdiri dari :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai

1.3.1 Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah

terima aset dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Balai.

1.3.2 Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), melakukan koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah I meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

1.3.3 Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), melakukan koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah II meliputi Kab. Lembata, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote, Kab. Flores Timur, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Ngada .

1.3.4 Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya terdapat Satuan Kerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, yaitu:

1.3.4.1 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

Untuk pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikepalai oleh Kepala Satker dan berikut kami sampaikan susunan organisasinya yang terdiri dari:

- a. PPK Tata Laksana
- b. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya

- c. PP-SPM

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

1.3.4.2 Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT

Untuk pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikepalai oleh Kepala Satker dan berikut kami sampaikan susunan organisasinya yang terdiri dari:

a. PPK Perencanaan dan Pengendalian

Bertugas mendukung penyusunan rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum.

b. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

Bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus.

c. PPK Rumah Swadaya dan RUK

Bertugas melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan PSU untuk Rumah Umum Bersubsidi.

d. PP-SPM

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

e. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

f. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Tugas :

- Mengumpulkan Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
- Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

Tanggungjawab :

- Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

g. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

Tugas :

- Mengumpulkan Menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKRA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
- Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPBW) beserta Arsip Data Komputer (ADK).

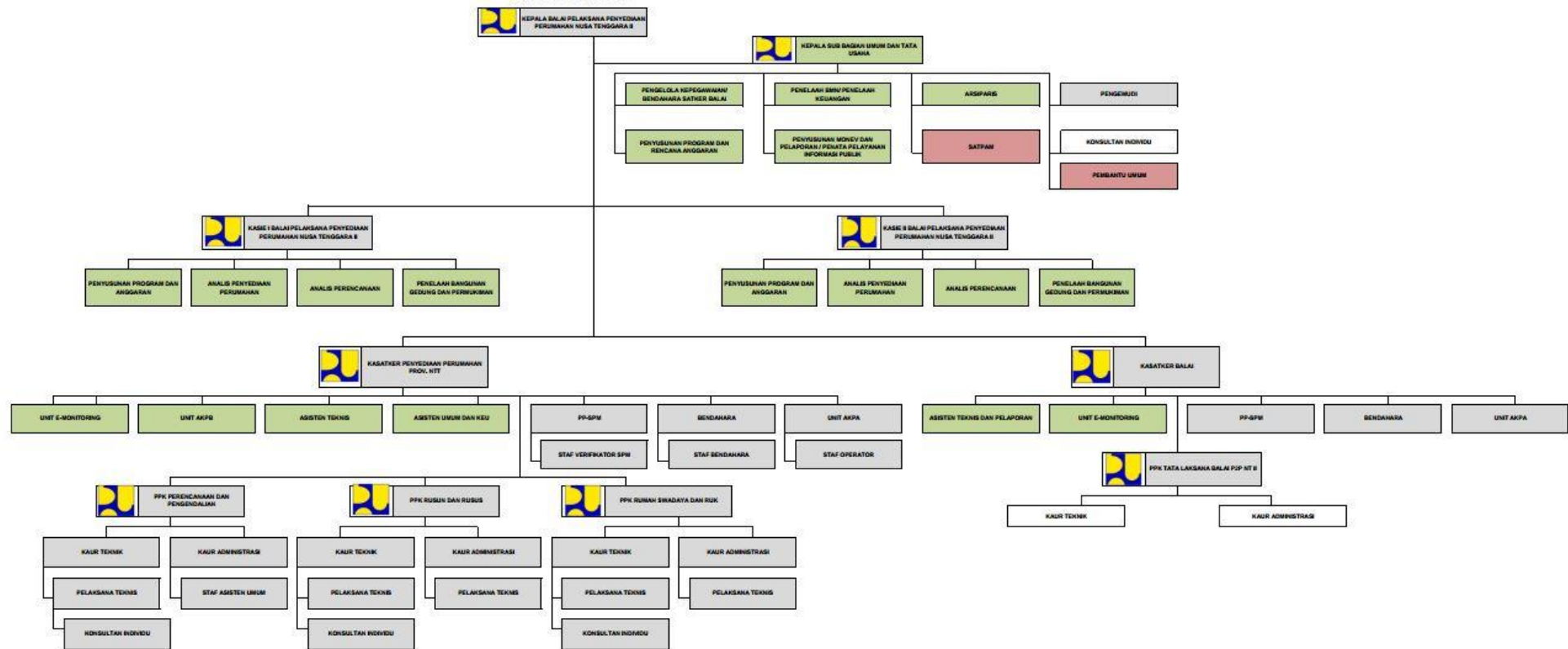
Tanggungjawab :



- Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.



Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II dapat diuraikan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
TAHUN ANGGARAN 2023**



 : MERANGKAP
 : DESA OLEH KUDOUTSOURCING

KUPANG, JANUARI 2023
 KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
 NUSA TENGGARA II

 YULIANA D. SUTISNA, ST-NTT
 NIP. 197608031990031003

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II antara lain :

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan yang membutuhkan transportasi laut untuk mobilitas bahan pokok dan logistik dengan biaya tambahan menyebabkan kenaikan harga dipasaran lokal kabupaten/kota, dan indeks pembiayaan infrastruktur yang ditetapkan tidak terpenuhi sehingga diperlukan evaluasi indeks harga wilayah yang riil.
2. Program Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat berjalan efektif dan efisien khusus penyusunan dokumen RP3KP karena kemampuan pembiayaan dan PAD atau APBD sangat terbatas, sehingga sampai saat ini (2020 s/d 2023) baru 1 (satu) kabupaten yang menerbitkan PERDA RP3KP yaitu kabupaten sumba barat dari 22 kab/kota, Dalam hal ini BP2P-NTII melaksanakan advokasi dan pendampingan untuk :
 - a. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider melalui kegiatan pendampingan PEMDA dalam rangka pembentukan Pokja PKP dan penyusunan dokumen RP3KP.
 - b. Pokja PKP yang terbentuk belum aktif karena belum ada Sekretariat, Anggaran dan Rencana Kerja serta Komitmen dan Keterlibatan Unsur-unsur Pokja/Forum PKP dalam kegiatan PKP juga belum Maksimal dalam kegiatan Pendataan PKP maupun Perencanaan PKP.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi terkait muatan dalam Dokumen RP3KP, Data Primer dan Data Sekunder yang termuat dalam buku profil belum lengkap, Peta peta yang disajikan belum sesuai dengan kebutuhan data dan analisis.
3. Keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah khusus yang dibangun melalui kolaborasi lintas unit organisasi tidak dapat diselesaikan sesuai target.
4. Kekurangan tenaga kerja dalam progress pembangunan rusun.
5. Pengadaan material yang terhambat karena akses menuju lokasi pekerjaan yang sangat sulit karena cuaca yang tidak menentu;
6. Proses Usulan Serah Terima Aset terkendala karena Dokumen Eksternal belum sesuai dengan ketentuan yang memerlukan waktu koordinasi dan perbaikan sehingga serah terima aset terlambat.
7. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Bagi Warga Pejuang Timor-Timur Paket I, II, dan III yang dilanjutkan pelaksanaannya pada 2024.

Rapat Koordinasi

Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan PKP T.A.2023

JPR
DERAL
IA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

PUP
SIGAP MEMBAN

T KOORDINASI

Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan PKP T.A.2023

ber 2023



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

BAGAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024;
3. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2020 - 2024.
4. Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II disusun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

a. Tujuan

Direktorat Jenderal Perumahan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II pada tahun 2020-2024 melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kriteria rumah layak huni mengacu pada 4 (empat) indikator dasar dalam parameter Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu:

1. Kecukupan luas bangunan menggunakan ketentuan minimal 7,2 meter persegi per kapita penghuni;
2. Ketahanan konstruksi untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/ keselamatan bangunan dan Kesehatan;
3. Akses air minum layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni;
4. Akses sanitasi layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni.

Upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dilakukan melalui :

1. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal (misal bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan pembangunan); serta
2. Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II merupakan bagian dari tujuan Direktorat Jenderal Perumahan secara umum adalah menyelenggarakan peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Pembangunan Rumah Susun, Pembangunan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, serta Bantuan layanan PSU bagi rumah umum.

b. Sasaran

Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan 2 (dua) program, yaitu:


1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni. Ketercapaian program dapat diukur melalui presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan/atau presentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU; dan
2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, dengan sasaran meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator kinerja program yaitu tingkat dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.

Dalam rangka mendukung Sasaran Direktorat Jenderal Perumahan tersebut maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II melaksanakan 2 (dua) sasaran kegiatan antara lain :

1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni diukur menggunakan 8 Indikator, yaitu:
 - a. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - b. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
 - c. Jumlah Bantuan Pengembangan sarana hunian pendukung KSPN
 - d. Jumlah Rumah susun yang dibangun
 - e. Jumlah Rumah susun yang dipelihara
 - f. Jumlah Rumah khusus yang dibangun
 - g. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara
 - h. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu :
 - a. Jumlah layanan sarana dan prasarana internal
 - b. Jumlah layanan dukungan manajemen Satker
 - c. Jumlah layanan perkantoran

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada awal Tahun 2023, telah dilaksanakan Penanda tangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Perumahan, Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yublina Dila Bunga**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930/199803 1 001

Pihak Pertama



Yublina Dila Bunga
NIP. 19700522 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	55 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	103 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	10 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	2.100 Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	700 Unit
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:

1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman

a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggaran

Rp 499.098.923.000

Rp 2.279.714.000

Rp 496.819.209.000

Rp 2.750.000.000

Rp 1.850.000.000

Rp 900.000.000

Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur


Rp 4.129.714.000

Rp 497.719.209.000

Total Rp 501.848.923.000


Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001


Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II



Yublina Dila Bunga
NIP. 19700522 199903 2 003

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Awal TA. 2023

Pada Bulan Desember, telah terjadi perubahan anggaran sehingga Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2022 juga mengalami perubahan (Revisi) sebagai berikut:



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yublina Dila Bunga**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua




Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama



Yublina Dila Bunga
NIP. 19700522 199903 2 003



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	845 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	103 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	7 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun *	0 Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.100 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan


* Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 2100 Unit, tidak menambah output pada tahun 2023 karena merupakan kegiatan MYC 2023-2024

Kegiatan:

1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	Rp	Anggaran
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	Rp	499.535.395.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp	2.804.094.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp	2.750.000.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	Rp	1.850.000.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp	900.000.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	Rp	4.654.094.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp	497.631.301.000
Total	Rp	502.285.395.000


Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II



Yublina Dila Bunga
NIP. 19700522 199903 2 003

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Revisi TA. 2023

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perumahan. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat, dan dampak.

Penilaian ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting serta berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Metode pengukuran yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\% \text{ Target Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selain itu, penilaian target kinerja juga melalui hasil evaluasi laporan kinerja yang berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan interpretasi sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 -30	Sangat Kurang

Gambar 5. Hasil Evaluasi Dan Implementasi SAKIP

2.4 TARGET KINERJA TAHUN 2023 MENURUT RENSTRA

Dalam hal ini, target kinerja merupakan sasaran dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II yang perlu diukur adalah kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2020 – 2024.

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	SAT	TARGET FISIK					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II								
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak							
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni							
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
	a. Jumlah Laporan Penyusunan Penyediaan Perumahan	Laporan	3	4	4	4	4	19
	b. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	4650	1050	1080	1620	1870	10870
	c. Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN	Unit	600	0	0	0	0	600
	d. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	42	216	146	230	165	799
	e. Jumlah Rusun yang dipelihara	Tower	2	3	8	9	6	28
	f. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	0	30	80	40	80	230
	g. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	40	40
	h. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	0	500	687	875	1110	3172
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
SS 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis lainnya							
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya							
SK	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
	a. Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
	b. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
	c. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Dari tabel dan uraian di atas target fisik renstra tahun 2023 berdasarkan renstra tahun 2020-2024 adalah :

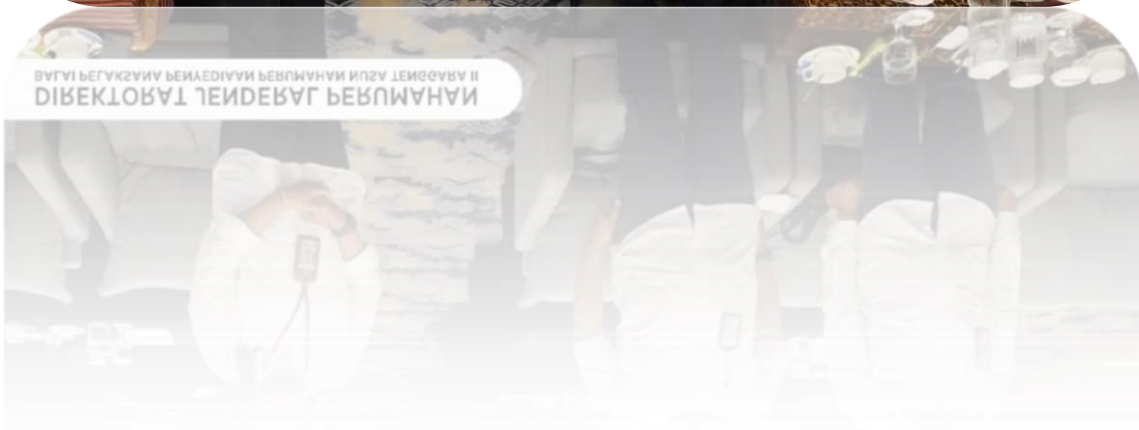
1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 4 Laporan.
2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas 1620 Unit
3. Jumlah Rumah Khusus yang di bangun 40 Unit
4. Jumlah Rumah Susun yang di bangun 230 Unit.
5. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 9 Tower.
6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara 0 Unit
7. Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU 875 Unit

sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 4 Laporan.
2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas 845 Unit
3. Jumlah Rumah Khusus yang di bangun 2100 Unit*
4. Jumlah Rumah Susun yang di bangun 103 Unit.
5. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 7 Tower.
6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara 0 Unit
7. Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU 1100 Unit.



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

BAB III

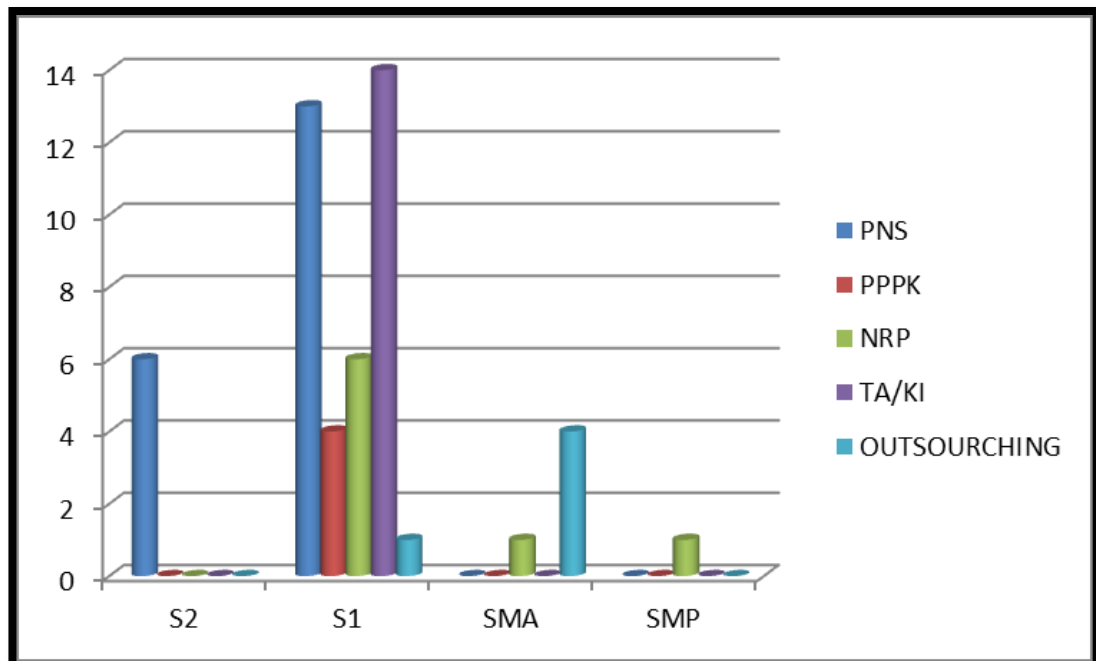
KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II pada tahun 2023, didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 50 (Lima Puluh) orang pegawai baik PNS, PPPK, non PNS, maupun Tenaga Ahli/Konsultan Individu (TA/KI) dan tenaga outsourcing. Komposisi pegawai terdiri dari 19 (tujuh belas) orang tenaga PNS atau sebesar 38%, 4 (empat) orang tenaga PPPK atau sebesar 8%, 8 (delapan) orang tenaga non PNS atau sebesar 16% dan 14 (empat belas) orang tenaga ahli/konsultan individual atau sebesar 28% dan 5 orang tenaga outsourcing atau sebesar 10%.

a) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Status Pegawai	Jenjang Pendidikan					
	SMP	SMA	D3	S1	S2	TOTAL
PNS	0	0	0	13	6	19
PPPK	0	0	0	4	0	4
Non PNS	1	1	0	6	0	8
KI	0	0	0	14	0	14
Outsourcing	0	4	0	1	0	5
TOTAL	1	5	0	38	6	50



a. Daftar Nama Pegawai Balai P2P NTII

Nama	NIP/NRP/NIK	Jabatan
Yublina D. Bunga, ST. MT	197005221990032003	Kepala Balai P2P NT II/ KPA Satker Balai P2P NTII
I Wayan Avend Mahawan Sumawa, ST. M.Eng	198405212010121002	Plt. Kasubag Umum dan Tata Usaha / Kepala Seksi Wilayah 1
Herman Ropa Rohi, ST	196806081998031015	Kepala Seksi Wilayah II /PP-SPM
Lidya Estalita Kini, ST. MT	197505152006042001	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Madya/PPK Tata Laksana Balai
Sriyanti R. Dakaweni, S.AB	197804172008012031	Analisis Kepegawaian/ Bendahara Pengeluaran
Ishaq Abdullah S.Ars.	199505122020121002	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama
Siti Zahra Arafah , S.Ars.	199604272022032017	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama
Assyifa Fauzia Refianti, S.Ars.	199809112022032014	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama
Darmanto Julius Nge, S.ST	199007142023211023	JF Tata bangunan dan Permukiman-Ahli Pertama
Alberth Polce Muda, ST	198905062023211026	Ahli Pertama Tata bangunan dan Permukiman-Ahli Pertama
Inocensius Franco Pay, ST	198406092023211025	JF Tata bangunan dan Permukiman-Ahli Pertama
Sherly Emilia Nepafay, ST	198609022023212036	JF Perencana-Ahli Pertama
Marlin Seventin K. Ayal, ST	F17101981092018001	Pelaksana Teknik
Goerge Oliveira Imanuel Behar, SH	F19081988092018001	Penelaah BMN
Yasinta Maria I. Nuka, ST	5303044407760000	Tenaga Ahli Perencanaan Ruswa dan RUK
Egidius Peka Dahe, ST	5371022411860000	Tenaga Ahli Kelembagaan
Pelipus Kire, SE	5371041208750000	Tenaga Ahli Pendataan
Aryanto Adrianus Kolawila, ST	5371040304930000	Tenaga Ahli Perencanaan Rusun dan Rumah Khusus
Benhard Mauta	F22091995092018001	Pramubakti
Nelson Sumarlin Amalo	F27031987092018001	Pengemudi
Bonita Felisiani Oematan	5301106710920006	Pramubakti
Daryanti Sarci Benu	5371034908820001	Pramubakti
Efer Sole	5301092303850001	Satpam
Mikael Mata	5371052009810002	Pengemudi
Januarius Bouk	5371041701840010	Pengemudi

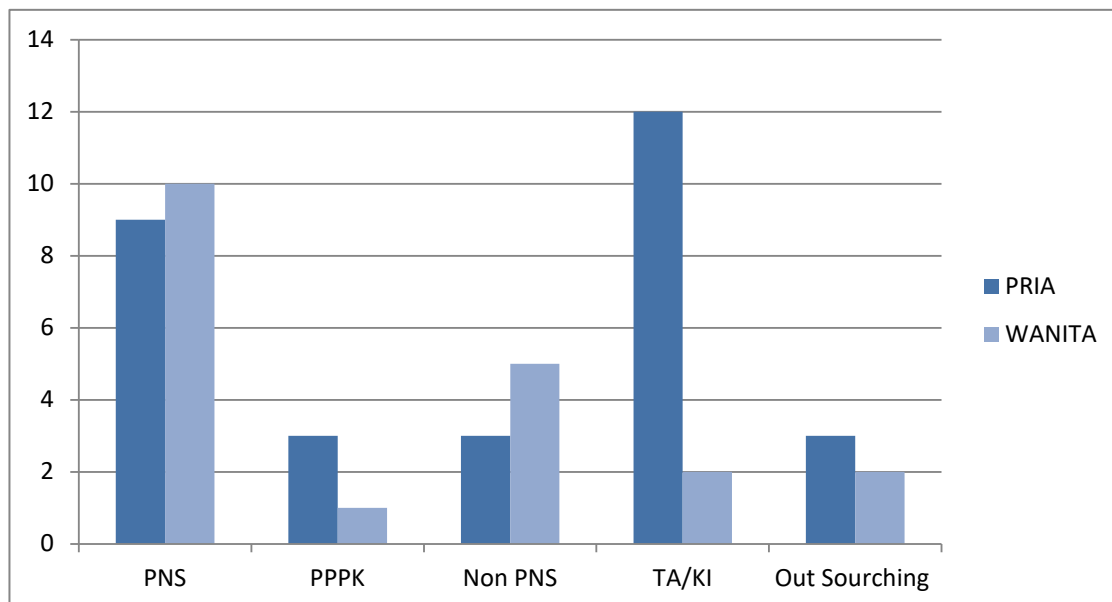
b. Daftar Nama Pegawai Satker PP Prov. NTT

Nama	NIP/NRP/NIK	Jabatan
Bastin Yungga Angguniko, ST. MM	198201092008011011	Kepala Satuan Kerja
Heru Sujarwo, SE	197201312009911002	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus
Bosman Pangaribuan SE M.P.W.K.	198205062014021001	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama/PPK Rumah Swadaya dan RUK
Shanti Sujitno S.E.	197911102009012003	Bendahara Pengeluaran
Asar Manuel Manoe, ST	197912072015021001	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama/Pejabat PSPM
Eva Juniantji Markus S.T.	198606062011012021	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama/Staff Pengelola Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTT
Nicolas Jalu Krisnanto S.T.	199504132019031006	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama/ Staff Pengelola Satker PP Prov.NTT
Nurul Afifah Wulandari S.Ars.	199406292020122005	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama/ Staff Pengelola PPK Rusun Rusus
Arlina Adiyati S.T., M.Ars.	199411252020122008	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama/ Staff Pengelola PPK Ruswa RUK
Vicky Sanjaya S.T.	199102052020121004	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama/ Staff Pengelola PPK Ruswa RUK
Afifa Junna Nuhafatya, S.Ars	199906262022032009	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan-Ahli Pertama/ Staff Pengelola Satker PP Prov.NTT
Maria Yulita Rafu, ST	F01091992010918001	Pelaksana Teknik
Yoko Meriam Here Wila, ST	F16051991092018002	Pelaksana Teknik
Maria Stephanie Magung, ST	F02051987092018001	Pelaksana Teknik
Cinthia Febriany Lay	F02021985092018001	Pengadministrasi Umum
Dominikus Pati, ST	5371041711790006	Tenaga Ahli Rumah Susun
Caesarina Karmelita Deo, ST	5319016203950002	Tenaga Ahli Rumah Susun
George Maleaki N. Feni, ST	5371030905900000	Tenaga Ahli Rumah Khusus
Andreas Henokh Tubulau, ST	5305010804950004	Tenaga Ahli Rumah Khusus
Helsah Lisatin Dae Panie, ST	5371030101910000	Tenaga Ahli Randal
Daud Yusuf Manubulu, ST		Tenaga Ahli Rumah Swadaya
Adrianus A. Gedoana, ST	3573050606850000	Konsultan Individu Ruswa
Maria Sigibertha Pidor, ST	5319024106950321	Konsultan Individu Rumah Swadaya
Benny Tua Siahaan, ST	5371040103940000	Tenaga Ahli Rumah Umum dan Komersial
Yan Christ Dolorosa Sae, ST	5302021307930001	Konsultan Individu RUK
Paternus Yandinatus, ST	5371021011670007	Tenaga Ahli Rumah Swadaya

b) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 7. Presentase Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS PEGAWAI	PRIA	WANITA	TOTAL
1	PNS	9	10	19
2	PPPK	3	1	4
3	Non PNS	3	5	8
4	TA/KI	12	2	14
5	Out Sourching	3	2	5
	TOTAL	30	20	50



3.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam mencapai tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, selain dukungan dari Sumber Daya Manusia yang memadai, dukungan sarana dan prasarana juga tidak kalah penting. Sarana dan prasarana merupakan sebuah aset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II. Aset tersebut tergabung menjadi Barang Milik Negara (BMN).

LAPORAN BARANG PENGGUNA										
INTRAKOMPTABEL										
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG										
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023										


UAPB	: 033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UAPPB-E1	: 420154	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

Tabel 8. Sarana dan Prasarana

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak lupa juga disusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan dasar pencairan dana/pengecasan. DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 telah disusun dan disahkan pada tanggal 30 November 2022 dengan Nomor DIPA: SP DIPA-033.07.1.420154/2023. Pagu anggaran awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II sebesar Rp 4.129.714.000.000,-. Sepanjang Tahun 2023, DIPA tersebut mengalami 5 (lima) kali perubahan. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:


DIPA	TANGGAL	PAGU	TAMBAH KURANG	KET
Revisi ke 00	30 Nov 22	4.129.714.000		DIPA Awal
Revisi ke 01	10 Feb 2023	4.129.714.000	0	Revisi Tetap (Revisi Hal 3 DIPA)
Revisi ke 02	12 April 2023	4.292.064.000	162.350.000	Penambahan Kegiatan SMAP
Revisi ke 03	14 Apr 23	4.292.064.000	0	Revisi Tetap (Revisi Hal 3 DIPA)
Revisi ke 04	10 Juli 2023	4.292.064.000	0	Revisi Pusat Pagu tetap
Revisi ke 05	30 Agst 2023	4.730.954.000	438.890.000	Revisi Pusat Tambahan MR, Wasdal Rusun dan Rusus
Revisi ke 06	09 Okt 2023	4.730.954.000	0	Revisi Tetap (Revisi Hal 3 DIPA)
Revisi ke 07	10 Nov 2023	4.830.954.000	100.000.000	Revisi Pusat Tambahan Wasdal Rusun
Revisi ke 08	02 Des 2023	4.830.954.000	0	-
Revisi ke 09	19 Des 2023	4.654.094.000	-176.860.000	Revisi Optimalisasi (Pengurangan Anggaran Tidak Terserap)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS 3460-2075-1287-7843

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (K20154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp.	4.129.714.000 (EMPAT MILIAR SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir		Jumlah Uang
Terlampir		
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupiah Murni	Rp.	4.129.714.000
2. PNPB		
PNBP TA Berjalan	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :		
1. KPPI: K U P A N G	(039) Rp.	4.129.714.000

E. Pernyataan Pejabat dan Katerangan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/penggesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Peliksan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022

A.N. MENTERI KEUANGAN


DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

ISA RACHMATARWATA

NIP. 196612301991021001


Gambar 6. DIPA Petikan Awal Satker Balai P2P NT2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS-3480-2075-1287-7843

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp.	4.129.714.000 (EMPAT MILIAR SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungai dan Sub Fungai :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 01


Tanggal : 10 Februari 2023

Terlampir		Jumlah Uang
Terlampir		
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupiah Murni	Rp.	4.129.714.000
2. PNPB	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	(039) Rp.	4.129.714.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)		
<ol style="list-style-type: none"> DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 		

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001


**Gambar 7. DIPA Revisi 1 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS-8390-4708-4064-2145

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp.	4.292.064.000 (EMPAT MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungai dan Sub Fungai :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 02


Tanggal : 12 April 2023

Terlampir		Jumlah Uang
Terlampir		
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupiah Murni	Rp.	4.292.064.000
2. PNPB	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	(039) Rp.	4.292.064.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)		
<ol style="list-style-type: none"> DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 		

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001


**Gambar 8. DIPA Revisi 2 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS:539648708-6064-2145

Revisi ke 03
 Tanggal : 14 April 2023

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Dijen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp. 4.292.064.000	(EMPAT MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :				
1. Rupiah Murni	Rp.	4.292.064.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
			5. Hibah Langsung	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN : K U P A N G (039) Rp. 4.292.064.000


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perlakuan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 ISA RACHMATARWATA
 NIP. 196612301991021001


**Gambar 9. DIPA Revisi 3 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS:539648708-6064-2145

Revisi ke 04
 Tanggal : 10 Juli 2023

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Dijen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp. 4.292.064.000	(EMPAT MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :				
1. Rupiah Murni	Rp.	4.292.064.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
			5. Hibah Langsung	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN : K U P A N G (039) Rp. 4.292.064.000


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perlakuan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 ISA RACHMATARWATA
 NIP. 196612301991021001


**Gambar 10. DIPA Revisi 4 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS-8426-2350-37804251

Revisi ke 05
Tanggal : 30 Agustus 2023

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Dijen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp.	4.730.954.000 (EMPAT MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.730.954.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K U P A N G	(039) Rp.	4.730.954.000
---------------------	-----------	---------------


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001


**Gambar 11. DIPA Revisi 5 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS-8426-2350-37804251

Revisi ke 06
Tanggal : 09 Oktober 2023

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Dijen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp.	4.730.954.000 (EMPAT MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.730.954.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K U P A N G	(039) Rp.	4.730.954.000
---------------------	-----------	---------------


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**Gambar 12. DIPA Revisi 6 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



05.0619436348274807

Revisi ke 07
Tanggal : 10 November 2023

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp.	4.830.954.000 (EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsional dan Sub Fungsional :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.830.954.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0


D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 4.830.954.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

Gambar 13. DIPA Revisi 7 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



05.0619436348274807

Revisi ke 08
Tanggal : 02 Desember 2023

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (24)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp.	4.830.954.000 (EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsional dan Sub Fungsional :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.830.954.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0


D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 4.830.954.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001


Gambar 14. DIPA Revisi 8 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420154/2023



DS-4988-4803-9682-4801

Revisi ke 09
Tanggal : 19 Desember 2023

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Dijen Perumahan
3. Provinsi	: (04)	NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (420154)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II
Sebesar	: Rp. 4.654.094.000	(EMPAT MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Terlampir	Terlampir	Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :				
1. Rupiah Murni	Rp.	4.654.094.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
6. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp. 0
1. KPPN K U P A N G	(039) Rp.	4.654.094.000		

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

Gambar 15. DIPA Revisi 9 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II



**DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II**

Gambar 16. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyediaan Perumahan serta Percepatan Serah Terima Aset pada tanggal 23 November 2023



**Gambar 17. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara II menerima sertifikat SNI ISO 37001:2016**

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA BALAI P2P-NTII

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi/ unit kerja untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja/Rencana Strategis. Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II selaku unit kerja Eselon III disampaikan ke unit organisasi Eselon II dan Eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan. Dalam menghitung akuntabilitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan target capaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 dengan Realisasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Membandingkan realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Tahun Anggaran 2022.

Dokumen Perjanjian Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan merupakan gabungan antara target dan capaian dari 2 (dua) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi indikator kinerja Balai telah dapat memenuhi target sesuai dengan PK revisi terakhir Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target akibat permasalahan/kendala dalam pelaksanaan antara lain Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Jumlah Rumah Khusus yang dibangun.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TA. 2023		
			Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	845 Unit	844 Unit	99.88%
		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	103 Unit	103 Unit	100%
		Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	7 Tower	7 Tower	100%
		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	2.100 Unit	-	*MYC 2023-2024
		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
		Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan PSU	1100 Unit	1.168 Unit	106.18%
2	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100%

**Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II**

Capaian kinerja yang tidak memenuhi target pada Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya disebabkan oleh adanya pengembalian dana ke kas negara sebanyak 1 unit rumah bantuan. Hal tersebut dikarenakan lahan rumah itu terdampak normalisasi sungai nanganae. dan untuk Pembangunan Rumah Khusus dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala fisik yang terjadi di lapangan, antara lain :

- Pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan/land development dilaksanakan oleh penyedia Jasa dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang baru terkontrak pada 26 Juni 2023.
- Lahan yang tersedia sampai M-1 Desember sebanyak 1206 Unit (termasuk Land Development yang dikerjakan sendiri oleh Perumahan).
- Jalan akses masuk dan keluar material dan tenaga kerja pada lokasi tidak dapat dilalui saat hujan, saat ini sedang dilakukan perbaikan lapisan

permukaan jalan dengan penambahan perkerasan limestone oleh penyedia jasa perumahan.

- d. Kurangnya tenaga kerja yang harus disiapkan sesuai rencana penanganan item pekerjaan.
- e. Menunggu jadwal kedatangan material yang berasal dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga secara fisik tidak dapat terealisasi sesuai dengan target dalam PK.

Sebaran realisasi kinerja yang merupakan gabungan dari 2 (dua) satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut

No	Indikator Kinerja	Balai P2P Nusa Tenggara II			Satker Penyediaan Perumahan Prov. NTT		
		Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
1	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4	4	100%	1	1	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	845	844	99.88%	845	844	99.88%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	103	103	100%	103	103	100%
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	7	7	100%	7	7	100%
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	2100	-	*MYC 2023-2024	2100	-	*MYC 2023-2024
6	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan PSU	1100	1168	106.18%	1100	1168	106.18%
SK : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100%	1	1	100%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2	2	100%	1	1	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	2	2	100%	1	1	100%

Tabel 11. Realisasi Kinerja Satker BP2P-NT2 & Satker PP Prov.NTT

Sedangkan target yang telah dicapai berdasarkan perbandingannya dengan pagu anggaran sesuai dengan DIPA yang dianggarkan, tercantum didalam

progres penyerapan satuan kerja Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam website i-emonitoring (<https://emonitoring.pu.go.id/>) adalah sebagai berikut:

Kinerja Per Program Kegiatan Output TA 2023											
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN											
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II											
Bulan : Desember											
Status : 03 Januari 2024 ; 08:00 WIB											
NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			2.804.094	2.771.410	100	98,83	91,46	100	100
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			2.804.094	2.771.410	100	98,83	91,46	100	100
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	2.804.094	2.771.410	100	98,83	91,46	100	100
2	WA	Program Dukungan Manajemen			1.850.000	1.843.887	100	99,67	100	100	100
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			1.850.000	1.843.887	100	99,67	100	100	100
2	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	1.650.000	1.644.665	100	99,68	100	100	100
3	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket	200.000	199.222	100	99,61	100	100	100
	TOTAL				4.654.094	4.615.297	100	99,17	94,86	100	
Keterangan: Perubahan Data Terkait Revisi akan Mengacu Pada 3 Waktu, yaitu: 08.00 WIB, 12.00 WIB, dan 16.00 WIB											
RN : Rencana											
RL : Realisasi											
<div> <div></div>kinerja < 30 <div></div>30 < kinerja < 50 <div></div>50 < kinerja < 65 <div></div>65 < kinerja < 75 <div></div>75 < kinerja < 85 <div></div>kinerja > 85 </div>											
- Belum bisa dinilai											

**Tabel 12. Kinerja per Program Kegiatan
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II**

Dari pagu DIPA revisi terakhir Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II yaitu revisi IX sebesar Rp. 4.654.094.000 realisasi keuangan adalah Rp 4. 615.297.000 atau sebesar 99.17%. Terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0.83% dikarenakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa.

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			496.731.301	292.627.629	100,00	58,91	100,00	69,00	69,00
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			496.731.301	292.627.629	100,00	58,91	100,00	69,00	69,00
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	269.216	254.406	100,00	94,50	100,00	100,00	100,00
2	CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	11.497.142	9.486.548	100,00	82,51	100,00	85,13	85,13
3	CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	5.719.576	4.642.834	100,00	81,17	100,00	95,40	95,40
4	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	479.245.367	278.243.842	100,00	58,06	100,00	68,28	68,28
2	WA	Program Dukungan Manajemen			900.000	839.549	100,00	93,28	100,00	100,00	100,00
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			900.000	839.549	100,00	93,28	100,00	100,00	100,00
5	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	900.000	839.549	100,00	93,28	100,00	100,00	100,00
	TOTAL				497.631.301	293.467.178	100,00	58,97	100,00	69,06	

Keterangan: Perubahan Data Terkait Revisi akan Mengacu Pada 3 Waktu, yaitu: 08.00 WIB, 12.00 WIB, dan 16.00 WIB

RN : Rencana

RL : Realisasi

	kinerja < 30
	30 < kinerja < 50
	50 < kinerja < 65
	65 < kinerja < 75
	75 < kinerja < 85
	kinerja > 85
-	Belum bisa dinilai

Tabel 13. Kinerja per Program Kegiatan Satker PP Prov. NTT

Dari pagu DIPA revisi terakhir Satker PP Provinsi NTT yaitu revisi XIV sebesar Rp. 497.631.301.000 realisasi keuangan adalah Rp 292.194.301.000 atau sebesar 58.97%.

Terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 41.03% dikarenakan faktor berikut :

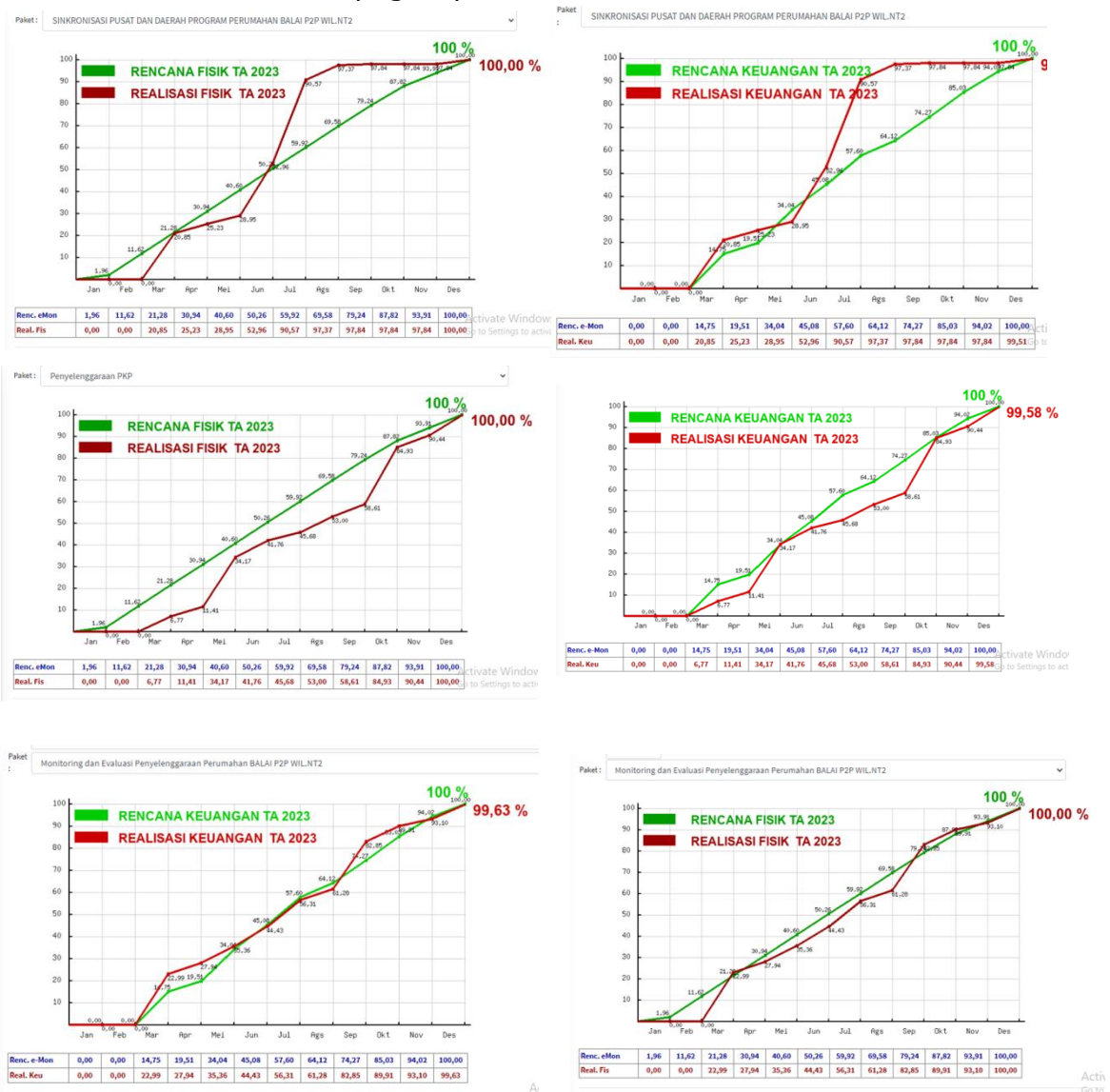
- Terdapat sisa anggaran pengawasan dan pengendalian masing – masing PPK.
- Terdapat paket yang gagal tender yaitu Rusun Akademi Teknik Kupang sehingga kegiatan tersebut dialihkan ke Tahun Anggaran 2024. Hal ini yang mengakibatkan progres kegiatan tersebut menjadi 0% di tahun Anggaran 2023.
- Terdapat anggaran yang tidak terealisasi di antaranya yaitu Sondir Boring Rumah Susun Akademi Teknik, Sondir Boring kegiatan Pemeliharaan Rmah Susun, dan Perencanaan Rumah Bambu, Sisa anggaran Pembangunan PSU, dan anggaran Manajemen Konstruksi untuk OPOR Rumah Susun Kejaksaaan Kupang dan Rumah Susun Pemkab Rote Ndao.
- Pembangunan Rumah Khusus Pejuang Eks Tim Tim tidak mencapai 100% di akhir tahun 2023 diakibatkan terlambatnya proses Land Development (LD) oleh Pihak Cipta Karya tidak mencapai target 100% maksimal november 2023, Pembangunan fisik Rumah Khusus Eks Tim Tim pun diajukan untuk dilanjutkan pembangunannya melalui mekanisme MYC 2023-2024 sehingga PAGU yang terserap adalah sebesar progres pekerjaan per 21 Desember 2023 (Batas pengajuan SPM untuk BAST/BAPP paket kontraktual).

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Umbur Dan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Engembala (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni							2.804.094	2.771.410		0	98,83	100
2	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian					2.804.094	2.771.410		0	98,83	100
3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					1.403.982	1.398.125		0	99,58	100
4	4978.ABF.009.101.A	SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH PROGRAM PERUMAHAN BALAI P2P WILNT2	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	242.324	241.134	0	0	99,51	100
5	4978.ABF.009.101.B	Penyelenggaraan PKP	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	694.873	691.944	0	0	99,58	100
6	4978.ABF.009.101.C	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan BALAI P2P WILNT2	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	466.785	465.046	0	0	99,63	100
7	4978.ABF.011	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					50.000	47.680		0	95,36	100
8	4978.ABF.011.101.A	SURVEY DAN WASDAL BPSPTT	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	50.000	47.680	0	0	95,36	100
9	4978.ABF.015	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					740.000	735.690		0	99,42	100
10	4978.ABF.015.104.A	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN Rusunawa	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	740.000	735.690	0	0	99,42	100
11	4978.ABF.016	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Khusus	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					115.000	112.990		0	98,25	100
12	4978.ABF.016.104.A	SURVEY DAN WASDAL RUSUS	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	115.000	112.990	0	0	98,25	100
13	4978.ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					255.732	254.916		0	99,68	100
14	4978.ABF.021.101.A	Penjaringan Usulan dan Verifikasi Lokasi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR TA 2023, serta Koordinasi Pendataan PSR	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	255.732	254.916	0	0	99,68	100
15	4978.ABF.024	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					239.380	222.009		0	92,74	100
16	4978.ABF.024.100.A	Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	88.888	71.518	0	0	80,46	100
17	4978.ABF.024.103.A	SMAP	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	150.492	150.491	0	0	100	100
18	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan							1.850.000	1.843.887		0	99,67	100
19	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen					1.650.000	1.644.665		0	99,68	100
20	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen					100.000	99.024		0	99,02	100
21	5578.EBA.962.101.A	GROUND BREAKING DAN PERESMIAN	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	7.964	7.920	0	0	99,45	100
22	5578.EBA.962.101.B	SERAH TERIMA ASET/PENDATAAN	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	12.954	18.204	0	0	140,53	100
23	5578.EBA.962.101.C	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	79.082	72.900	0	0	92,18	100
24	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					1.550.000	1.545.641		0	99,72	100
25	5578.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	AU	Swakelola	RPM	1.550.000	1.545.641	0	0	99,72	100
26	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket					200.000	199.222		0	99,61	100
27	5578.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit/m2/Paket					200.000	199.222		0	99,61	100
28	5578.EBB.951.101.A	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi BALAI P2P WILNT2.	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Barang	E-purchasing	RPM	169.440	162.461	0	0	95,88	100
29	5578.EBB.951.101.B	Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor BALAI P2P WILNT2	1	Dokumen	NUSA TENGGARA TIMUR	Barang	E-purchasing	RPM	30.560	36.761	0	0	120,29	100
TOTAL									4.654.094	4.615.297	0	0	99,17	100

Tabel 14. Progres Penyerapan Anggaran pada Output Kebijakan Sarana dan Prasarana, Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal pada Satker Balai P2P Nusa Tenggara II

Keterangan :

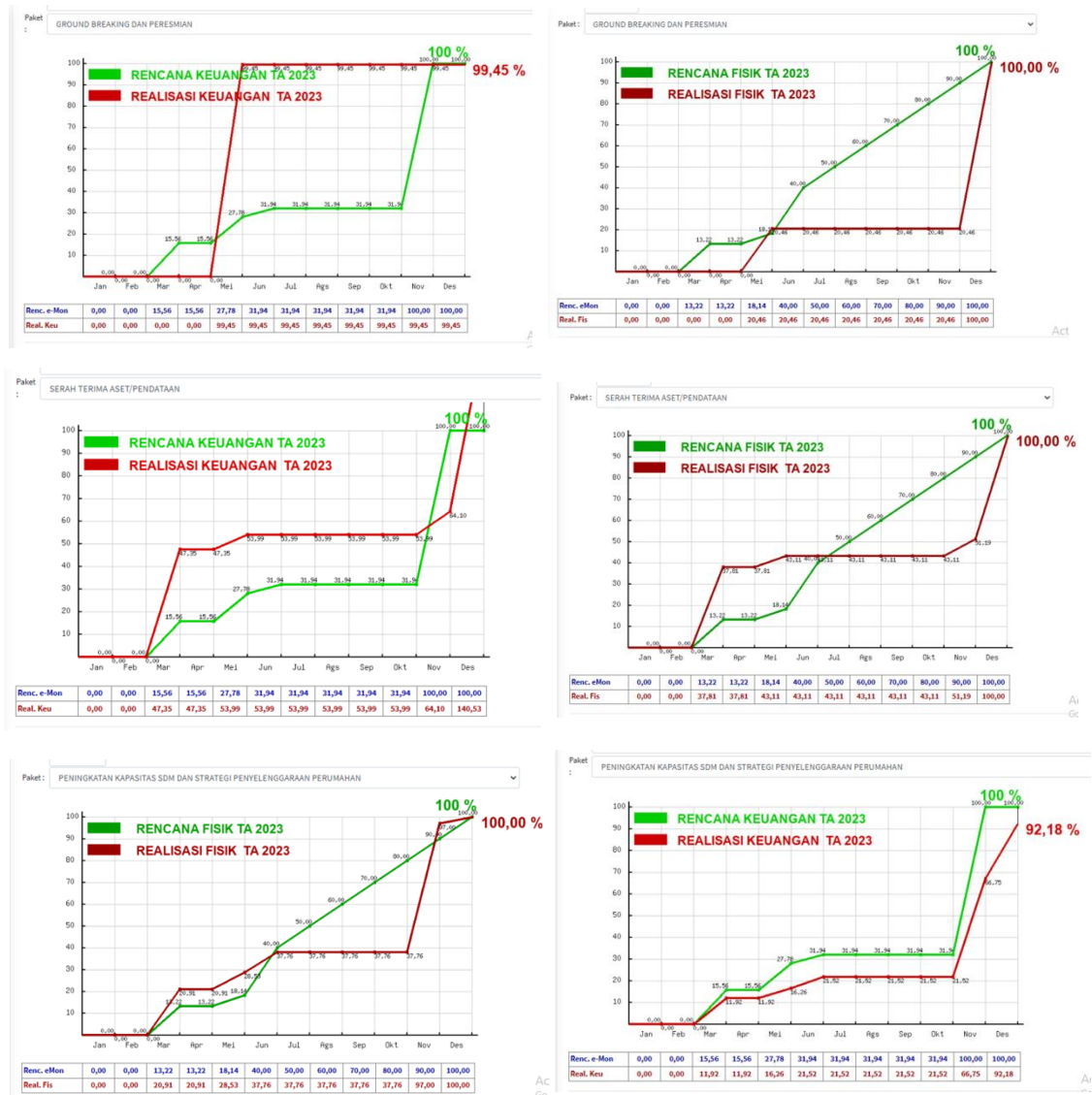
- a. Pada Sasaran Kinerja **Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni** dengan Indikator Kinerja **Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan** didapat dari Komponen **Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat-Daerah** yang terbagi menjadi 3 Sub Komponen, yaitu (1) Sinkronisasi Program Pusat-Daerah; (2) Pembinaan Penyelenggaraan PKP; dan (3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan. Dari ketiga sub komponen ini, menghasilkan realisasi keuangan sebesar 99.51% atau Rp 241.134.000 dari total pagu Rp 242.324.000.



Gambar 18. Rencana dan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Sasaran Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak huni

- b. Pada Sasaran Kinerja **Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan** memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu (1) Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana

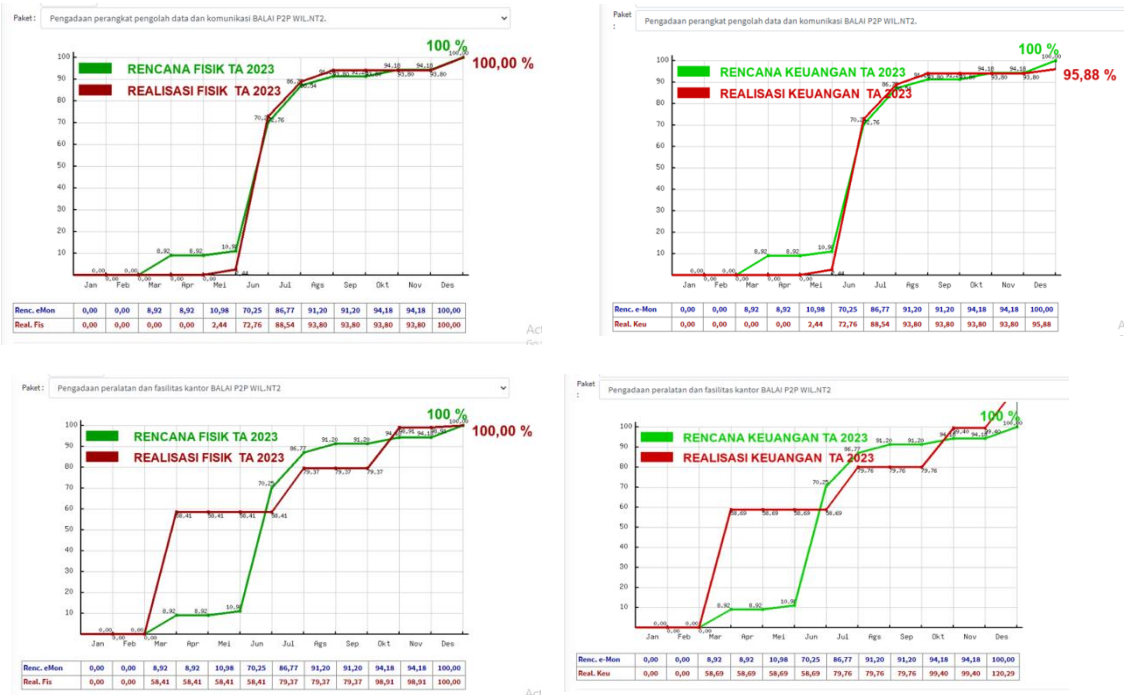
Internal; (2) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan (3) Jumlah Layanan Perkantoran. Poin (2) dan (3) termasuk kedalam Output Layanan Dukungan Manajemen Internal, sedangkan poin (1) termasuk kedalam output Layanan Sarana dan Prasarana Internal didalam i-emonitoring. Indikator Kinerja Jumlah **Layanan Dukungan Manajemen Satker** dua komponen yaitu Layanan Umum dan Layanan Perkantoran. Layanan Umum memiliki realisasi keuangan sebesar 99,024%. sedangkan Layanan Perkantoran memiliki realisasi keuangan sebesar 99.72% yaitu Rp 1.545.641.000 dari pagu Rp 1.550.000.000.



Gambar 19. Rencana dan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Sasaran Kinerja Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan

- c. Pada Indikator Kinerja **Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal** terdiri dari Sub komponen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang memiliki realisasi sebesar 95.88 % atau

setara dengan Rp. 162.641.000 dari pagu sebesar Rp. 169.440.000 & Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor yang memiliki realisasi sebesar 120.29 % atau setara dengan Rp 36.761.000 dari pagu sebesar Rp 30.560.000.



Gambar 20. Rencana dan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Indikator Kinerja Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal

4.1.1 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Pada Sasaran Kinerja ini terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu

1. Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan;
2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun;
4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara;
5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun;
6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara;
7. Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun.

4.1.1.1 Analisis Pencapaian Perencanaan Penyediaan Perumahan

1. Sinkronisasi Program Pusat Daerah

Pagu yang ada pada Sub Komponen ini adalah Rp 200.171.000. Realisasi secara keuangan yang dapat dicapai oleh Satuan kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II adalah Rp 196.641.000 atau sebesar 98,24%, sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target output sebanyak 1 rekomendasi. Pencapaian terhadap sub komponen ini didapat berdasarkan beberapa kegiatan yang terdapat dalamnya, diantaranya adalah Kegiatan Rapat Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi yang

dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka koordinasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi bidang perumahan, baik itu dengan tujuan ke Kantor Pusat, di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan rapat ini merupakan rapat rutin yang dilaksanakan idealnya 2 kali dalam satu tahun, yaitu pada awal dan akhir tahun. Detail kegiatan sebagai berikut :

a. Waktu Pelaksanaan

Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat- Daerah Provinsi NTT Tahap I dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat Tanggal 3-5 Mei 2023.

b. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah Provinsi NTT Tahap I Tahun 2023 diselenggarakan secara hybrid atau tatap muka langsung.

c. Narasumber

Narasumber dalam Pelaksanaan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah Provinsi NTT Tahap I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
- 2) Direktorat Rumah Susun
- 3) Direktorat Rumah Khusus
- 4) Direktorat Rumah Swadaya
- 5) Direktorat Rumah Umum dan Komersial
- 6) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Nusa Tenggara Timur
- 8) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

d. Materi

Beberapa butir penting yang perlu disampaikan pada Narasumber dalam Pelaksanaan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah Provinsi NTT Tahap I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyampaian Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020-2024 dan Prioritas Penganggaran TA 2024 Direktorat Jenderal Perumahan oleh Direktorat SSPP;
- 2) Penyampaian Prioritas Pembangunan Rumah Susun TA 2024 oleh Direktorat Rumah Susun;
- 3) Penyampaian Prioritas Pembangunan Rumah Khusus TA 2024 oleh Direktorat Rumah Khusus;
- 4) Penyampaian Prioritas Pembangunan Rumah Swadaya TA 2024 oleh Direktorat Rumah Swadaya; Penyampaian Prioritas Pembangunan Rumah Umum dan Komersial TA 2024 oleh Direktorat Rumah Umum dan Komersial;

- 5) Pembahasan Readiness Criteria usulan 2024 (hasil Konreg 2023);
- 6) Pembahasan Usulan Baru 2024 dan Readiness Criteria ;
- 7) Input Usulan dan Readiness Criteria ke SIBARU ; dan
- 8) Kesimpulan dan Penutupan Kegiatan

e. Pembiayaan

Kegiatan ini di bebaskan dalam DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023;

f. Dokumentasi



2. Pembinaan Penyelenggaraan PKP

Kegiatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang merupakan salah satu program amanah dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan terdiri dari beberapa tahap kegiatan. Berdasarkan panduan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman Tahun 2023 yang

dikeluarkan oleh direktorat SSPP, kegiatan yang dikelola oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dengan melibatkan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a. Pengadaan tenaga ahli
- b. Rapat persiapan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKP.
- c. Rapat koordinasi I.
- d. Advokasi ke daerah kabupaten/kota terpilih/tertentu (offline dan online).
- e. Rapat evaluasi akhir kegiatan.
- f. Penyusunan Laporan Akhir.

Detail kegiatan sebagai berikut :

a. Waktu Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan TA. 2023 dilakanakan pada hari Selasa-Jumad Tanggal 17-20 Oktober 2023.

b. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan. TA. 2023 diselenggarakan secara hybrid atau tatap muka langsung.

c. Narasumber dan Moderator

Narasumber dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan. TA. 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II
- 2) Bappelitbangda/Ketua Pokja PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Nusa Tenggara Timur
- 4) Kemenkum HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 6) BANK BTN Cabang Kupang
- 7) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 8) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sedangkan Moderator pada Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan. T. A 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II
- 2) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Materi

- 1) Beberapa butir penting yang perlu disampaikan pada Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan. T. A 2023 adalah sebagai berikut : Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam Peningkatan Kolaborasi di Daerah.
- 2) Capaian Kinerja Kemandirian Pokja PKP Provinsi NTT.
- 3) Urgensi Penerapan SPM dan Penyusunan RP3KP.
- 4) Tata Cara Penetapan Program Pemerintah Daerah PERDA RP3KP.
- 5) Pembiayaan Pembangunan Sektor Perumahan Menggunakan Sumber Dana Desa Tahun 2021-2023 Prov.NTT.
- 6) Pembangunan Rumah subsidi (MBR) dan Non Subsidi Tahun 2021-2023 Provinsi NTT.
- 7) Penanganan Perumahan Kumuh, Permukiman Kumuh di Provinsi NTT Tahun 2021-2023.
- 8) Pelaksanaan dan Hasil Pendataan Anggota Keluarga, Data Penanganan PKE dan Stunting Provinsi NTT 2021-2023.
- 9) Pemenuhan data Profil Pembangunan Sektor Perumahan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Perumahan
- 10) Pengelolaan data PKP dan Capaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Provinsi NTT.

e. Pembiayaan

Kegiatan ini di bebaskan dalam DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023.

f. Dokumentasi



3. Pendampingan Penyusunan RP3KP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Maksud dari Pendampingan penyusunan RP3KP agar pemerintah kabupaten mampu melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen RP3KP secara terstruktur, efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen yang berkualitas bagi daerah.

Sedangkan tujuan dari pendampingan penyusunan RP3KP ialah:

- a. Tersusunnya Dokumen RP3KP sesuai NSPK
- b. RP3KP yang disusun mampu menjawab permasalahan PKP di daerah yakni RTLH, Backlog, Kumuh, Rumah pada negatif list (Kawasan Lindung, LP2B, Bencana) dan ketersediaan/keterjangkauan PSU, dan
- c. Menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai acuan pembangunan PKP di daerah.

Adapun Tahapan Pendampingan Penyusunan RP3KP adalah :

- Dokumen RP3KP wajib di verifikasi muatan substansi oleh BP2PNT II.
- BP2PNT II melakukan verifikasi Buku Profil data PKP, Buku Analisis, Buku rencana dan Peta.
- BP2PNT II melaksanakan Pendampingan penyusunan Dokumen RP3KP secara Online maupun Offline.
- Hasil verifikasi di sampaikan BP2PNT II melalui Surat Kepala Balai untuk di Tindaklanjuti oleh Pemda kepada Tim penyusun.
- Apabila dokumen telah di Perbaiki maka BP2PNT II akan menyurati Pemda untuk melakukan proses ke Penyiapan Naskah Akademik dan Ranperda.

Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan :

a) Kabupaten Flores Timur

Instansi yang menangani penyusunan RP3KP Kabupaten Flores Timur ialah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Perumahan. Kegiatan penyusunan RP3KP ini dilaksanakan secara swakelola dengan besaran anggaran sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 4 bulan. Pelaksanaan pendampingan RP3KP Kabupaten Flores Timur dilaksanakan berdasarkan Usulan Permintaan Fasilitas Pendampingan Penyusunan Dokumen RP3KP T.A 2023 yang disampaikan melalui surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Nomor: DPKPP.600/ 31 / PKP/ IV / 2023 tanggal 11 April 2023.



b) Kabupaten Sumba Barat Daya

Instansi yang menangani penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat Daya ialah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Perumahan. Kegiatan penyusunan RP3KP ini dilaksanakan secara Kontraktual dengan besaran anggaran sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak menyampaikan surat minat pendampingan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan/ Balai P2PNT II namun mengingat tugas pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh Balai P2PNT II kepada Kabupaten/Kota sehingga kegiatan pendampingan penyusunan sampai pada verifikasi dokumen tetap dilaksanakan oleh Balai P2PNT II.



c) Kabupaten Manggarai Timur

Instansi yang menangani penyusunan RP3KP Kabupaten Manggarai Timur ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Perumahan. Kegiatan penyusunan RP3KP ini dilaksanakan secara Swakelola bekerjasama dengan Perguruan tinggi yakni LPM Institut Teknologi Malang dengan besaran anggaran sebesar Rp. 700.00.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan. Pelaksanaan pendampingan RP3KP Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan berdasarkan Usulan Permintaan Fasilitas Pendampingan Penyusunan Dokumen RP3KP T.A 2023 yang disampaikan melalui surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor: PUPR.610/84/IV/2023 tanggal 04 April 2023.



4) Kabupaten Ngada

Instansi yang menangani penyusunan RP3KP Kabupaten Ngada ialah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan. Kegiatan penyusunan RP3KP ini dilaksanakan secara Swakelola/kerja sama dengan Perguruan tinggi yakni LPM Institut Teknologi Malang dengan besaran anggaran sebesar Rp. 500.00.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 5 bulan. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan tidak menyampaikan surat minat pendampingan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan/ Balai P2PNT II namun mengingat tugas pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh Balai P2PNT II kepada Kabupaten/Kota sehingga kegiatan pendampingan penyusunan sampai pada verifikasi dokumen tetap dilaksanakan oleh Balai P2PNT II.



5) Kabupaten Lembata

Instansi yang menangani penyusunan RP3KP Kabupaten Lembata ialah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bidang PSU. Kegiatan penyusunan RP3KP ini dilaksanakan secara Swakelolah bekerjasama dengan Perguruan tinggi yakni LPM Institut Teknologi Malang dengan besaran anggaran sebesar Rp. 600.00.000 (enam ratus juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 5 bulan Pelaksanaan pendampingan RP3KP Kabupaten Lembata dilaksanakan berdasarkan Usulan Permintaan Fasilitas Pendampingan Penyusunan Dokumen RP3KP T.A 2023 yang disampaikan melalui surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Nomor: DISPERKIMTAN. 800/71/IV/2023 tanggal 12 April 2023.



6) Kota Kupang

Instansi yang menangani penyusunan RP3KP Kota Kupang ialah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Permukiman. Pada tahun 2023 ini, Kegiatan penyusunan RP3KP Kota Kupang hanya di fokuskan pada Penyusunan Buku Profil data RP3KP yang dilaksanakan secara Kontraktual dengan besaran anggaran sebesar Rp. 270.00.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 4 bulan. Pemerintah daerah Kota Kupang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak menyampaikan surat minat pendampingan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan namun mengingat tugas pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh Balai P2PNT II kepada Kabupaten/Kota sehingga kegiatan pendampingan penyusunan sampai pada verifikasi dokumen tetap dilaksanakan oleh Balai P2PNT II.



7) Kabupaten Ende

Instansi yang menangani penyusunan RP3KP Kabupaten Ende ialah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kegiatan penyusunan RP3KP ini dilaksanakan secara Swakelola bekerjasama dengan Perguruan tinggi yakni LPM Institut Teknologi Malang dengan besaran anggaran sebesar Rp. 600.00.000 (enam ratus juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak menyampaikan surat minat pendampingan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan namun mengingat tugas pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh Balai P2PNT II kepada Kabupaten/Kota sehingga kegiatan pendampingan penyusunan sampai pada verifikasi dokumen tetap dilaksanakan oleh Balai P2PNT II. Sejauh ini Dinas PRKPP kabupaten Ende belum menyampaikan dokumen RP3KP baik buku Profil, Analisa, rencana dan album peta ke Balai P2NTII sehingga belum dilakukan verifikasi oleh TAPP.

Tabel 15. Status Penyusunan RP3KP Di Wilayah Balai Nusa Tenggara II TA 2023

No.	Wilayah	Status RP3KP										Informasi Tambahan	
		Belum Menyusun		Sedang Menyusun			Sudah Menyusun					Alokasi Anggaran (Rupiah)	Jenis Kegiatan (Swakelola /Kontraktual)
		Belum dianggarkan	Sudah dianggarkan	Persiapan	Penyusunan Profil	Penyusunan Rencana	Review dokumen RP3KP		Prolegda	Legislasi			
							Pilihan	Tahun Penyusunan		Pilihan	Nomor Peraturan		
1	Kab. Alor		Ya	Ya	Ya	Ya		2019				600.000.000,00	Kontraktual
2	Kab. Belu		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	2017 dan 2022 Review Ulang				547.000.000,00	Kontraktual
3	Kab. Ende		Ya	Ya	Ya	Ya		2023				600.000.000,00	Swakelola
4	Kab. Flores Timur		Ya	Ya				2023				500.000.000,00	Swakelola
5	Kab. Kupang		Ya	Ya	Ya	Ya		2022				1.000.000.000,00	Kontraktual
6	Kab. Lembata		Ya	Ya			Ya	2018 dan 2023 Review Ulang				600.000.000,00	Swakelola
7	Kab. Malaka	Ya											
8	Kab. Manggarai		Ya	Ya	Ya	Ya		2022				500.000.000,00	Swakelola
9	Kab. Manggarai Barat	Ya											
10	Kab. Manggarai Timur		Ya	Ya				2023				800.000.000,00	Swakelola
11	Kab. Nagekeo		Ya	Ya	Ya	Ya		2022				800.000.000,00	Kontraktual
12	Kab. Ngada		Ya	Ya				2023				500.000.000,00	Swakelola
13	Kab. Rote Ndao	Ya											
14	Kab. Sabu Raijua		Ya	Ya	Ya	Ya		2021				800.000.000,00	Kontraktual
15	Kab. Sikka		Ya	Ya	Ya	Ya		2021				300.000.000,00	Kontraktual
16	Kab. Sumba Barat		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	2017 dan 2022 Review Ulang	Ya	Ya	02 Tahun 2023'	300.000.000,00	Kontraktual
17	Kab. Sumba Barat Daya		Ya	Ya				2023				700.000.000,00	Kontraktual
18	Kab. Sumba Tengah		Ya	Ya	Ya	Ya		2022				700.000.000,00	Kontraktual
19	Kab. Sumba Timur		Ya	Ya	Ya	Ya		2018				600.000.000,00	Kontraktual
20	Kab. Timor Tengah Selatan	Ya											
21	Kab. Timor Tengah Utara	Ya											
22	Kota Kupang		Ya	Ya				2023				270.000.000,00	Kontraktual
23	Provinsi NTT		Ya	Ya	Ya	Ya		2021				2.500.000.000,00	Kontraktual
TOTAL		5	18	18	18	18	3		1	1	1		

Penyusunan RP3KP TA.2023 = 7 Kab/Kota

Total Kab/ Kota menyusun RP3KP = 17 Kab/Kota

Total Kab/ Kota yang belum menyusun RP3KP = 17 Kab/Kota

Tabel 16. Progres Pendampingan Penyusunan RP3KP Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	PROGRES PENDAMPINGAN PENYUSUNANA RP3KP TAHUN 2023								
		SEMINAR BUKU RP3KP			PROSES PENJAMINAN KUALITAS			HASIL PENJAMINAN KUALITAS		
		BUKU PROFIL DATA PKP	BUKU ANALISIS	BUKU RENCANA	BUKU PROFIL DATA PKP	BUKU ANALISIS	BUKU RENCANA	BUKU PROFIL DATA PKP	BUKU ANALISIS	BUKU RENCANA
1	Sumba Barat Daya	Sudah Seminar	Sudah Seminar	Sudah Seminar	Sudah diverifikasi	Sudah diverifikasi	Sudah diverifikasi	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi
2	Manggarai Timur	Sudah Seminar	Sudah Seminar	Proses Susun	Sudah diverifikasi	Sudah diverifikasi	-	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi	-
3	Ngada	Sudah Seminar	Sudah Seminar	Proses Susun	Belum diverifikasi	-	-	-		-
4	Flores Timur	Sudah Seminar	Sudah Seminar	Proses Susun	Sudah diverifikasi	Sudah diverifikasi	-	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi	-
5	Lembata	Sudah Seminar	Sudah Seminar	Proses Susun	Belum diverifikasi	-	-	-		-
6	Kota Kupang	Sudah Seminar	TAHUN 2024	TAHUN 2024	Sudah diverifikasi	-	-	Surat Kabalai terlampir hasil verifikasi	-	-
7	Ende	Proses Susun	Proses Susun	-	-	-	-	-	-	-

4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan

Realisasi pada sub komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan perumahan adalah sebesar 99.63% atau sebesar Rp 465.046.000 dari pagu sebesar Rp 466.785.000 dan realisasi fisik 100%. Seperti pada kedua sub komponen sebelumnya diatas, kegiatan pada sub komponen ini meliputi acara dan perjalanan dinas. Peruntukannya dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perumahan yang dilakukan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan perumahan Nusa Tenggara II, diantaranya adalah verifikasi usulan bantuan, usulan OPOR, serta monitoring terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu yang ideal dilakukan saat 0%, 50%, dan 100% pembangunan, serah terima kunci dan serah terima BMN. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi penyelenggaraan Bantuan Rumah Susun, Bantuan Rumah Khusus, Bantuan PSU, dengan detail kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Survey dan Verifikasi Teknis Rumah Susun yang diusulkan untuk OPOR 2023



b) Rapat DED OPOR Rumah Susun untuk 10 TB



c) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan OPOR Rusun sebanyak 7 TB





d) Serah Terima Kunci dan Pengelolaan Rumah Susun



e) Rapat Penjaringan Usulan, Verifikasi Bantuan PSU TA.2023 dan Evaluasi Bantuan PSU



f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSU



4.1.2 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Untuk Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, target pada Perjanjian Kinerja adalah 845 unit dengan capaian sebesar 844 unit atau 99,88%. Kurang tercapainya capaian kinerja pada Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya disebabkan oleh adanya pengembalian dana ke kas negara sebanyak 1 unit bantuan. Hal tersebut dikarenakan unit rumah tersebut berada di daerah wilayah sungai.

ALOKASI & LOKASI BSPTS PROVINSI NTT TA 2023



Jumlah Unit Alokasi Tahap	Jumlah Unit	Pencairan	Penyaluran
Jumlah Unit SK Tahap III	55 Unit	1,100,000,000	1,100,000,000
Jumlah Unit SK Tahap IV	88 Unit	1,760,000,000	1,760,000,000
Jumlah Unit SK Tahap V	45 Unit	900,000,000	900,000,000
Jumlah Unit SK Tahap VIII	26 Unit	520,000,000	520,000,000
Jumlah Unit SK Tahap IX	36 Unit	720,000,000	720,000,000
Jumlah Unit SK Tahap XIII	490 Unit	9,800,000,000	9,800,000,000
Jumlah Unit SK Tahap XVI	50 Unit	1,000,000,000	1,000,000,000
Jumlah Unit SK Tahap XIX	55 Unit	1,100,000,000	1,100,000,000
Jumlah	845 Unit	16,900,000,000	16,900,000,000

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain :

1. Saat awal verifikasi CPB belum adanya pembangunan bronjong dan tanggul di lokasi tersebut dan tidak ada persoalan karena sudah diterbitkan status lahan tersebut.
2. Dalam proses pembangunan 1 unit rumah bantuan tersebut dan sudah mencapai 50%, rumah itu disepakati untuk dibongkar tanpa adanya informasi ke PPK Rumah Swadaya karena lahan rumah itu terdampak normalisasi sungai nanganae.

Tindak Lanjut :

1. PPK Rumah Swadaya membuat berita acara pembatalan dan berita acara itu disampaikan ke penerima bantuan bahwa bantuan program BSPTS itu sudah dibatalkan.

2. Dokumentasi lokasi terdampak :



4.1.3 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Susun

Pada tahun anggaran 2023, target dan capaian terhadap bantuan pembangunan rumah susun di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II terdiri dari 2 Tower Block atau 103 Unit, rinciannya antara lain 60 Unit Rumah Susun Brimob dan 43 Unit Rumah Susun Yayasan Sukmabar Kevikepan Labuan Bajo Seminari St. Yohanes Paulus II. Pembangunan Rumah Susun ini merupakan pekerjaan Multi Years Contract (MYC) yang berjalan sejak tahun 2022.

Tabel 17. Target dan Realisasi Bantuan Pemb. Rumah Susun di TA 2023

Lampiran 17.1 Target dan Realisasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun di TA 2023				
No	Satuan Kerja	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Kinerja
				Fisik
IK : Jumlah Rumah Susun yang dibangun				
1	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	103	103	100%
	Jumlah			
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	103	103	100%

Berikut merupakan detail Pembangunan Rumah Susun Yayasan Sukmabar Kevikepan Labuan Bajo Seminari St. Yohanes Paulus II

b. Data Umum :

Nama Kontrak : Pembangunan Rumah Susun Yayasan Sukmabar Kevikepan Labuan Bajo Seminari St. Yohanes Paulus II
Alamat : Labuan Bajo Manggarai Barat
Tower : 1 Tower

Tipe : Tipe Barak Panjang 2 Lantai/8 Barak/172 Orang
Unit : 43 Unit
Koordinat : S: 8,295471 E: 19.531969

KONTRAKTOR :

Penyedia : PT. Sketsa Konstruksi
Kontrak : 7 November 2022
Add I Kontrak : 24 Januari 2023
Add II Kontrak : 14 April 2023
Add III Kontrak : 26 Mei 2023
Add IV Kontrak : 24 Juli 2023
Akhir Kontrak : 5 September 2023
Nilai Kontrak : Rp 6,825,036.000
Nilai Add. Kontrak : Rp 7,495,800.000

KONSULTAN SUPERVISI

Penyedia : PT. Prisma Karya Utama
Kontrak : 7 November 2022
Nilai Kontrak : Rp. 524.835.750,-



c. Data Umum :

Nama Kontrak : Pembangunan Rumah Susun POLRI Brimob Polda NTT
Alamat : Jl. Timor Raya, Kec. Kota Lama Kota Kupang
Tower : 1 Tower
Tipe: : Tipe 36/4 Lantai
Unit: : 60 Unit
Koordinat: : S: -10,155406 E: 123,597719

KONTRAKTOR :

Penyedia : PT. Paramitra Multi Prakasa
Kontrak : 12 Desember 2022
Add. Kontrak : 11 Mei 2023
ADD II : 24 Juli 2023

ADD III : 7 Agustus 2023
ADD IV : 2 November 2023

Akhir Kontrak : 15 Desember 2023
Nilai Kontrak : Rp 21.329.433.000
Nilai ADD Rp. 23.441.000.000

KONSULTAN SUPERVISI

Penyedia : KSO Cipta Ganesha
Kontrak : 16 Desember 2022
Nilai Kontrak : Rp. 1,198,800,000,-



4.1.4 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Rumah Susun

Tabel 18. Target dan Realisasi Bantuan Pemeliharaan Rumah Susun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II TA 2023.

No	Satuan Kerja	Target (Tower)	Realisasi (Tower)	Kinerja
				Fisik
IK : Jumlah Rumah Susun yang dibangun				
1	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTT	7	7	100%
	Jumlah			
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	7	7	100%

Berikut detail untuk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Timur :

a. Data Umum

Nama Kontrak : Perawatan Rumah Susun Pondok Pesantren Walisongo
Alamat : Jl. Ikan Duyung, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab.

Ende, Prov. NTT

Tower : 1 Tower
Tipe: : Tipe Barak/ 3 Lantai
Unit: : 54 Unit
Koordinat: : S: -8,86205 E: 121,68494

KONTRAKTOR :

Penyedia : CV. Rahmah
Kontrak : 18 September 2023

Akhir Kontrak : 11 Desember 2023

Nilai Kontrak : Rp 835,233,000

KONSULTAN SUPERVISI

Penyedia : CV. Indo Design Konsultan
Kontrak : 18 September 2023
Nilai Kontrak : Rp. 96,800,000,-



b. Data Umum

Nama Kontrak : Perawatan Rumah Susun Universitas Tribuana Kalabahi
Alamat : Jl Soekarno Hatta, Kel Welai Timur, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor

Tower : 1 Tower
Tipe: : Tipe 24/3 Lantai
Unit: : 37 Unit
Koordinat: : -8.207432, 124.570491

KONTRAKTOR :

Penyedia : CV. Agung Rajawali Perkasa
Kontrak : 17 Oktober 2023

Akhir Kontrak : 31 Desember 2023

Nilai Kontrak : Rp 661.125.100,00

KONSULTAN SUPERVISI

Penyedia : CV. Bayu Pratama

Kontrak : 17 Oktober 2023

Nilai Kontrak : Rp 80.800.000,00



c. Data Umum

Nama Kontrak : Perawatan Rumah Susun Lembaga Kongregasi Pengikut Yesus CIJ Ende

Alamat : Jl Woloare A, Potunggo, Kel Kota Ratu, Kec Ende Selatan, Kab Ende

Tower : 1 Tower

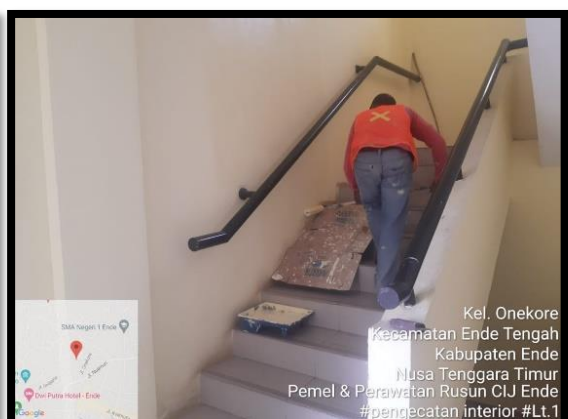
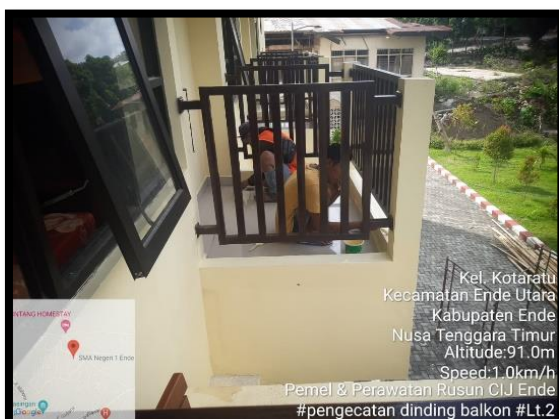
Tahun Anggaran : 2018

Tipe: : Tipe 24 / 3 Lantai

Unit: : 37 Unit

Status Penghunian : Huni

Nilai Swakelola : 524.824.000





d. Data Umum

Nama Kontrak : Perawatan Rumah Susun Seminari Menengah St. Maria Imaculata Lalian

Alamat : Jl. Nela Raya, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu

Tower : 1 Tower

Tahun Anggaran : 2019

Tipe: : Tipe Barak / 2 Lantai

Unit: : 36 Unit

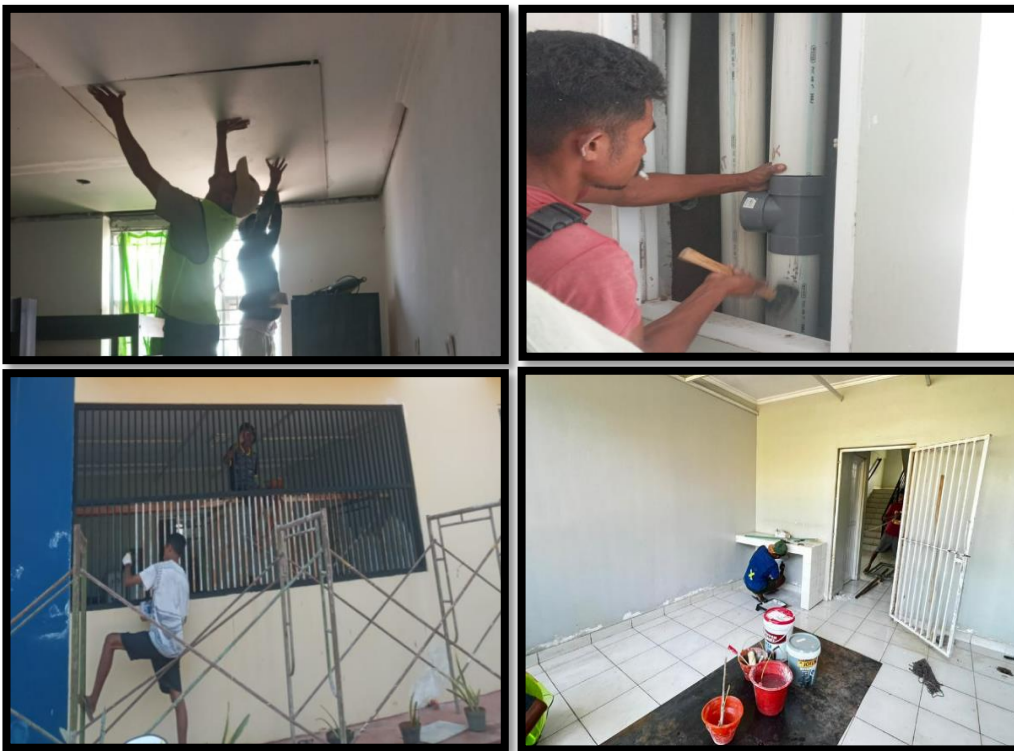
Status Penghunian : Huni

Nilai Swakelola : 353.668.000



e. Data Umum

Nama Kontrak : Perawatan Rumah Susun Universitas Widya Mandira
Kabupaten Kupang
Alamat : Jl. San Juan, Kel. Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah,
Kab. Kupang
Tower : 1 Tower
Tahun Anggaran : 2017
Tipe: : Tipe 24 / 3 Lantai
Unit: : 37 Unit
Status Penghunian : Huni
Nilai Swakelola : Rp 487.146.000



f. Data Umum

Nama Kontrak : Perawatan Rumah Susun Pemkab. Rote Ndao
Alamat : Dsn. Ne'e, Ds. Sanggaoen, Kec. Lobalain, Kab. Rote
Tower : 1 tower
Tahun Anggaran : 2018
Tipe: : Tipe 36 / 3 Lantai
Unit: : 42 Unit
Status Penghunian : Huni
Nilai Swakelola : 540.111.000



g. Data Umum

Nama Kontrak : Perawatan Rumah Susun Kejaksaan Kupang
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Yohanes, Oebobo, Kota Kupang
 Tower : 1 Tower
 Tahun Anggaran : 2019
 Tipe: : Tipe 36 / 2 Lantai
 Unit: : 21 Unit
 Status Penghunian : Huni
 Nilai Swakelola : 603.284.000





4.1.5 Kegiatan Bantuan Pembangunan PSU

Pada tahun anggaran 2023 pekerjaan pembangunan PSU bagi Rumah MBR di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1100 Unit.

Berikut detailnya:

a. Perumahan Gemstone Regency Kota Kupang

Pengembang	PT. Charson Timorland Estate
Penyedia Jasa	PT. Charson Timorland Estate
Nilai Kontrak	Rp 1.353.887.000.00
Pelaksanaan	03-Apr-23 s/d 31-Jul-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	800 m – 5 Ruas
Unit Bantuan	200 unit
Rencana PHO	24 Juli 2023
Pemeliharaan	120 Hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



b. Perumahan Bukit Emas Wekatimun Kabupaten Belu

Pengembang	PT. Danang Mandiri
Penyedia Jasa	PT. Danang Mandiri

Nilai Kontrak	Rp 798.079.000,00
Pelaksanaan	03-Apr-23 s/d 31-Jul-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	465 m – 05 Ruas
Unit Bantuan	93 unit
Rencana PHO	25 Juli 2023
Pemeliharaan	120 Hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



c. Perumahan Puri Lasiana Indah Kota Kupang

Pengembang	PT. Dafe putri Pratama Mandiri
Penyedia Jasa	PT. Dafe putri Pratama Mandiri
Nilai Kontrak	Rp 672.619.000,00
Pelaksanaan	03-Apr-23 s/d 31-Jul-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	367,2 m – 7 ruas
Unit Bantuan	108 unit
Rencana PHO	24 Juli 2023
Pemeliharaan	120 Hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



d. Perumahan Palma Hill Kota Kupang

Pengembang	PT. Cipta Palma Persada
Penyedia Jasa	PT. Cipta Palma Persada
Nilai Kontrak	Rp 416.968.000
Pelaksanaan	03-Apr-23 s/d 14-Jun-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	245 m – 3 ruas
Unit Bantuan	70 unit
Rencana PHO	13 Juli 2023
Pemeliharaan	120 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



e. Perumahan Sunly Permata Bello Kota Kupang

Pengembang	PT. Sunly Cemerlang Jaya
Penyedia Jasa	PT. Sunly Cemerlang Jaya
Nilai Kontrak	Rp 298.868.000
Pelaksanaan	03-Apr-23 s/d 14-Jun-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	175 m – 2 ruas
Unit Bantuan	50 unit
Rencana PHO	13 Juli 2023
Pemeliharaan	90 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



f. Perumahan Griya Fatukoa Indah Kota Kupang

Pengembang	PT. Anugerah Timor Sasando
Penyedia Jasa	PT. Anugerah Timor Sasando
Nilai Kontrak	Rp 393.348.000
Pelaksanaan	03-Apr-23 s/d 30-Jul-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	231 m – 2 ruas
Unit Bantuan	66 unit
Rencana PHO	24 Juli 2023
Pemeliharaan	120 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



g. Perumahan Nusa Malole Recidendce Kabupaten Kupang

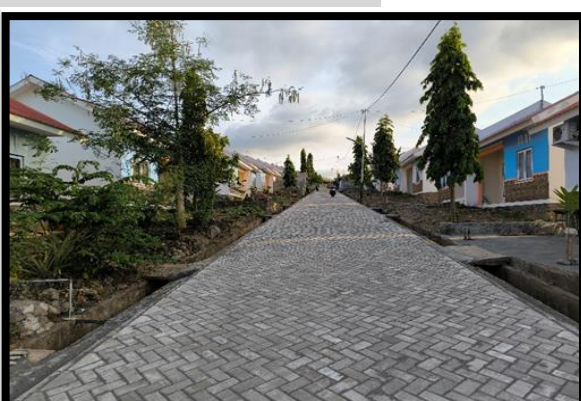
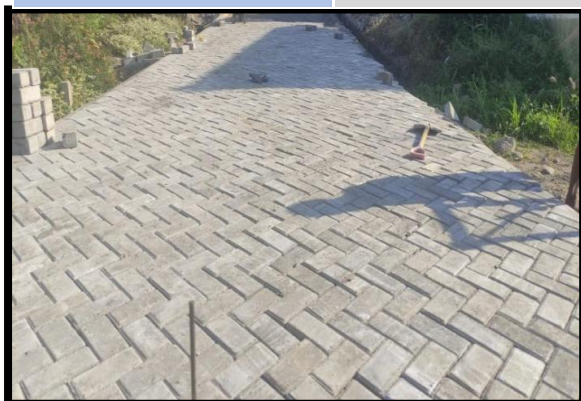
Pengembang	PT. Abner Bangun Sejahtra
Penyedia Jasa	PT. Abner Bangun Sejahtra
Nilai Kontrak	Rp 469.275.000
Pelaksanaan	03-Apr-23 s/d 30-Jul-23

Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	275 m – 2 ruas
Unit Bantuan	55 unit
Rencana PHO	25 Juli 2023
Pemeliharaan	120 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



h. Perumahan Sikka Regency Kabupaten Sikka

Pengembang	PT. Flores Real Estate
Penyedia Jasa	PT. Flores Real Estate
Nilai Kontrak	Rp 388.748.967
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d 04-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	248 m – 1 ruas
Unit Bantuan	62 unit
Rencana PHO	01 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



i. Perumahan Graha mandiri Kabupaten Sumba Timur

Pengembang	PT. Istana karang
Penyedia Jasa	PT. Istana Karang
Nilai Kontrak	Rp 486.164.000
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d 04-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	28- m – 4 Ruas
Unit Bantuan	70 unit
Rencana PHO	01 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



j. Perumahan Pondok Indah Sanggaoen Kabupaten Rote Ndao

Pengembang	PT. Sasando Nusa Korbafo
Penyedia Jasa	PT. Sasando Nusa Korbafo
Nilai Kontrak	Rp 488.593.000
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d 04-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	250 m – 4 Ruas
Unit Bantuan	50 unit
Rencana PHO	01 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



k. Perumahan Sunly Permata Belo 2 Kota Kupang

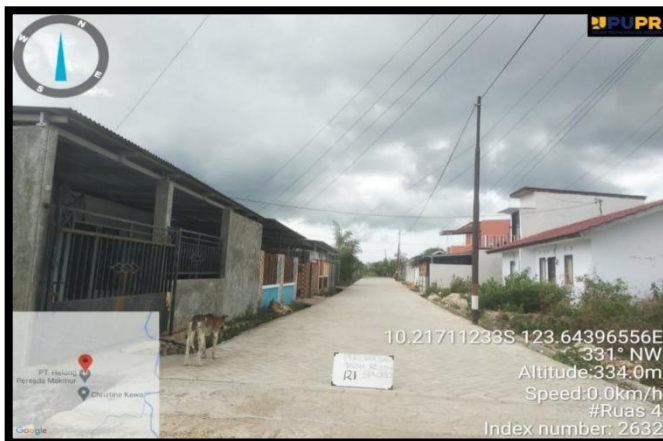
Pengembang	PT. Sunly Cemerlang Jaya
Penyedia Jasa	PT. Sunly Cemerlang Jaya
Nilai Kontrak	Rp 319.842.471
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d 04-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	187,5 m – 4 ruas
Unit Bantuan	50 unit
Rencana PHO	01 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



i. Perumahan Palma Residence Kota Kupang

Pengembang	PT. Helong Persada Makmur
Penyedia Jasa	PT. Helong Persada Makmur
Nilai Kontrak	Rp 407.788.000

Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d 04-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	250 m – 4 ruas
Unit Bantuan	60 unit
Rencana PHO	01 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



j. Perumahan Nusa Persada Kota Kupang

Pengembang	PT. Nusa Timor Perkasa
Penyedia Jasa	PT. Nusa Timor Perkasa
Nilai Kontrak	Rp 542.659.000
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d 04-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	319,5 m – 6 ruas
Unit Bantuan	71 unit
Rencana PHO	01 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



k. Perumahan Golden Lotti Residence Kota Kupang

Pengembang	CV. Sanita Utama
Penyedia Jasa	CV. Sanita Utama
Nilai Kontrak	Rp 342.610.800
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d 15-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	210 m – 5 ruas
Unit Bantuan	60 unit
Rencana PHO	10 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pemasangan kanstin dan paving



l. Perumahan Trans Belo Regency Kabupaten Kupang (PSU23-NTT-KAB. KUPANG-03)



m. Perumahan Trans Belo Regency Kabupaten Kupang (PSU23-NTT-KAB. KUPANG-03)

Pengembang	PT. Sasando Nusa Korbafo
Penyedia Jasa	PT. Sasando Nusa Korbafo
Nilai Kontrak	Rp 301.000.000
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d15-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	175 m – 3 ruas
Unit Bantuan	50unit
Rencana PHO	10 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai



n. Perumahan Petuk Indah Kupang Kabupaten Kupang (PSU23-NTT-KAB. KUPANG-02)

Pengembang	PT. Anugerah Timor Sasando
Penyedia Jasa	PT. Anugerah Timor Sasando
Nilai Kontrak	Rp 356.913.800
Pelaksanaan	06-Sept-23 s/d15-Des-23
Tipe Jalan	Paving
Panjang Jalan	192,6 m – 2 ruas
Unit Bantuan	53 unit
Rencana PHO	10 Desember 2023
Pemeliharaan	180 hari
Ket. Pekerjaan	Pekerjaan Selesai

4.1.6 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Resiko

Indikator Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko merupakan indikator baru yang ditambahkan pada Tahun Anggaran 2023 dikarenakan adanya penambahan anggaran terkait kegiatan yang dicanangkan oleh Direktorat Kepatuhan Intern. Kegiatan ini terdiri atas 2 laporan yang terdiri dari Kegiatan Zona Integritas dan Kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Anto Penyusunan (SMAP). Kegiatan ini hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Balai P2P Nusa Tenggara II walaupun pelaksanaannya melibatkan Satker PP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data tangkapan layar i-emon pada Tabel 14 diatas, capaian penyerapan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan adalah 80.46% atau sebesar Rp71.518.000 dari Rp88.888.000.

SMAP

Paket Pekerjaan	:	Konsultan Pendampingan Pengembangan Penerapan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II
Jenis Pengadaan	:	Pengadaan Langsung
Tahun Pembangunan	:	2023
Nomor Sertifikat	:	MSAC-ABS-0021
Tanggal Mulai Sertifikat	:	17 Mei 2023
Tanggal Berakhir Sertifikat	:	13 September 2023
Lingkup	:	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II



4.1.7 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan

4.1.7.1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Capaian pada indikator kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Internal yaitu sebesar 100% yaitu berjumlah 1 layanan. Layanan Sarana dan Prasarana Internal hanya ada di Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, sementara Satker PP Prov. NTT tidak ada. Capaian ini meliputi pemenuhan terhadap peralatan fasilitas perkantoran seperti pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas kantor.

Tabel 19 Target dan Realisasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II TA. 2023

No	Satuan Kerja	Target (Layanan)	Realisasi (Layanan)	Kinerja
				Fisik
IK : Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
1	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. NTT	1	1	100%
2	Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	1	1	100 %
	Jumlah	2	2	100 %

4.1.7.2 Layanan Dukungan Manajemen Satker

Layanan dukungan manajemen satker memiliki capaian 100% dengan jumlah 4 layanan. Layanan ini meliputi 2 Layanan Umum & 2 Layanan Perkantoran.

Tabel 20 Target dan Realisasi Layanan Umum di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II TA. 2023

No	Satuan Kerja	Target (Layanan)	Realisasi (Layanan)	Kinerja
				Fisik
IK : Jumlah Layanan Umum				
1	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. NTT	1	1	100 %
2	Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	1	1	100 %
	Jumlah	2	2	100 %

Pada Layanan Umum satuan kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terdapat beberapa kegiatan/acara yang telah diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Groundbreaking dan Peresmian

Pembangunan 2.100 Unit Rumah Khusus bagi warga Pejuang eks timor timur ditandai dengan dilakukannya acara seremonial Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Khusus Bagi Warga Pejuang Eks Timor-Timur Di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Jumat 12 Mei 2023.

Rumah khusus tersebut akan dibangun Teknologi RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana), yang Memiliki Keunggulan Tahan Gempa, dan Pelaksanaan Lebih Cepat Rumah ini memiliki Tipe 36 dengan Luas Tanah 150 M2 (10 x 15), dan dilengkapi sarana dan prasarana dasar permukiman antara lain Jaringan Air Bersih, Jalan Lingkungan, dan Fasilitas umum lainnya.

Pembangunan rumah bagi warga eks Timor Timur dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.

"Rumah yang dibangun memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rumah warga eks pejuang Timor Timur yang berada di Kabupaten Kupang," kata Korinus Masneno selaku Bupati Kabupaten Kupang.

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Bagi Warga Pejuang Timor Timur dibagi dalam 3 (tiga) Paket pekerjaan fisik yaitu Paket I,II,III dan 1 (satu) manajemen konstruksi.





b. Serah Terima Aset/Pendataan

Proses Pengalihan Aset – 13 Tower							
NO	NAMA RUSUN	TA.	KAB/KOTA	NILAI PEROLEHAN	CATATAN DOK. INTERNAL	CATATAN DOK. EKSTERNAL	KETERANGAN
Rumah Susun yang dibangun SNVT dan Satker PP Prov. NTT (2017 – 2023)							
1	Univ. Widy Mandira (UNIKA)	2017	Kota Kupang	Rp13.201.800.666	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
2	Lembaga Kongregasi Pengikut Yesus - CIJ Ende	2018	Kabupaten Ende	Rp11.119.093.667	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
3	Univ Tribuana Kalabahi	2018	Kabupaten Alor	Rp11.078.593.623	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
4	Kejaksaa Kupang	2019	Kota Kupang	Rp9.141.118.700	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
5	Seminari Menengah Santa Maria Immaculata Lalian	2019	Kabupaten Belu	Rp8.257.180.300	Lengkap	Lengkap	Proses ftd BAST M1 Januari 2024
6	Universitas Kevikepan Borong	2020-2021	Kabupaten Manggarai Timur	Rp17.282.695.532	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
7	Rusun BPKP Prov. NTT	2021	Kota Kupang	Rp20.635.645.055	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
8	Rusun Universitas Nusa Cendana (UNDANA)	2021	Kota Kupang	Rp16.043.049.000	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
9	Rusun Sekolah Berchmans Todabelu	2021	Kabupaten Ngada	Rp18.153.284.000	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
10	Yayasan Persekolahan Bina Wirawan (Ende)	2021-2022	Kabupaten Ende	Rp17.288.183.000	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
11	Keuskupan Larantuka Flores Timur	2021-2022	Kabupaten Flores Timur	Rp22.397.598.000	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
12	Rusun STT Gereja Kristen Sumba	2021/2022	Kabupaten Sumba Timur	Rp17.556.077.502	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen
Rumah Susun yang dibangun SNVT dan Satker Bangrum							
13	Pemkab Rote Ndao	2018	Kabupaten Rote Ndao	Rp19.473.094.798	Lengkap	Lengkap	Telah diusulkan ke Sesditjen

Proses Pengumpulan Dokumen – 9 Tower							
NO	NAMA RUSUN	TA.	KAB/KOTA	NILAI PEROLEHAN	CATATAN DOK. INTERNAL	CATATAN DOK. EKSTERNAL	KETERANGAN/TL
Rumah Susun yang dibangun SNVT dan Satker PP Prov. NTT (2017 – 2023)							
1	PP Walisongo Ende	2017	Kabupaten Ende	Rp 13.583.746.667	Lengkap	Lengkap	Pencermatan dokumen fisik untuk diusulkan di M2 Jan 2024
2	ST Yohanes Paulus II - Labuan Bajo	2017	Kabupaten Manggarai Barat	Rp 13.581.271.667	<ul style="list-style-type: none"> - TOR Meubelair - Addendum fisik tidak bermaterai - Kontrak SPK Meubelair tidak bermaterai - Foto BMN baru meubelair - ABD belum dittd 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah koreksi nama satker - Proposal - perbedaan penulisan Sertifikat tanah dalam pernyataan kebenaran dan kesediaan menerima hibah - Akta yayasan terbaru 	Proses pelengkapan dokumen internal dan eksternal (surat Balai ke Satker M1 Jan 2024)
3	Pemkab Sikka	2018	Kabupaten Sikka	Rp 14.094.852.000	<ul style="list-style-type: none"> - TOR Meubelair, MK - PHO & FHO Lanjutan TA. 2020 - FHO TA. 2021 - ABD - Surat Pernyataan Kasatker berisi kronologis pembayaran dan pengembalian uang muka oleh Kasatker 	Lengkap	Dalam proses perbaikan dan pelengkapan dokumen berdasarkan catatan BAI
4	St. Paulus Ledalero Maumere	2018	Kabupaten Maumere	Rp 13.417.263.110	<ul style="list-style-type: none"> - RKAKL 2018 - Kontrak meubelair (materai) - ABD (ftd MK belum ada) - Addendum I - Addendum II - Dok LHA (cut off) 	Perbaikan Surat kesediaan menerima hibah salah nama satker	Proses pelengkapan dokumen internal dan eksternal (surat Balai ke Satker M1 Jan 2024)
5	Rusun Yayasan Sukmabar Kevikepan Labuan Bajo Seminari St. Yohanes Paulus II	2022-2023	Kabupaten Manggarai Barat	Rp 9.291.078.750	Belum Lengkap	Belum Lengkap	Pekerjaan selesai Desember 2023, dalam masa pemeliharaan dan pengumpulan Dok. Internal dan Eksternal
6	Rusun Brimob Polda NIT	2022-2023	Kota Kupang	Rp 26.179.256.000	Belum Lengkap	Belum Lengkap	

Proses Pengumpulan Dokumen – 9 Tower							
NO	NAMA RUSUN	TA.	KAB/KOTA	NILAI PEROLEHAN	CATATAN DOK. INTERNAL	CATATAN DOK. EKSTERNAL	KETERANGAN/TL
Rumah Susun yang dibangun SNVT dan Satker Bangrum							
1	Seminari Sanpio	2015	Kab. Manggarai Timur	Rp. 15.435.510.247	Lengkap	(permintaan dari BMN BP2P Jawa I untuk memintakan kembali Dok. Eksternal ber ttd Ketua Yayasan)	Koordinasi dengan Yayasan permintaan Dok. Eksternal
2	Seminari Tinggi ST. Petrus Ritapiret	2018	Kab. Sikka	Rp 16.344.112.460	Lengkap		
3	Pemkab Timor Tengah Utara	2018	Kabupaten TTU	Rp 17.836.962.080	Lengkap	Lengkap	Informasi BP2P Jawa I akan diusulkan pada Januari 2024

Tabel 21 Target dan Realisasi Layanan Perkantoran di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II TA. 2023

No	Satuan Kerja				Target (Layanan)	Realisasi (Layanan)	Kinerja Fisik
IK : Jumlah Layanan Perkantoran							
1	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan	Kerja Prov. NTT		1	1	100 %	
2	Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	Nusa Tenggara II		1	1	100 %	
	Jumlah				2	2	100 %

Pada Layanan Perkantoran satuan kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Pada indikator ini terdiri dari Operasional dan Pemeliharaan kantor diantaranya seperti keperluan administrasi berupa honor operasional, belanja barang persediaan barang konsumsi, langganan listrik, telpon, air, dan biaya operasional kantor lainnya. Capaian untuk indikator ini adalah 100% dengan 1 layanan di masing-masing satuan kerja.

4.1.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian dari sasaran kegiatan pertama yaitu **Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni** dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebagian besar mencapai kinerja 100% sebagaimana pada tabel diatas. Berdasarkan data i-emonitoring (www.emonitoring.pu.go.id) dari pagu DIPA revisi terakhir yaitu revisi IX sebesar 4.654.094.000 realisasi keuangan adalah 4.615.297.000 atau sebesar 99.17%. terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0.83% dikarenakan sisa anggaran belanja perjalanan biasa.

Dalam proses penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, untuk itu tindak lanjut yang dilakukan antara lain :

1. Adanya pemantauan, evaluasi dan perencanaan terhadap program-program dan kegiatan yang menjadi amanah didalam anggaran satuan kerja.
2. Pergeseran alokasi anggaran pada akun-akun yang berpotensi untuk tidak dapat dilakukan penyerapan dengan merevisi POK.

3. Menciptakan koordinasi dan menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, diantaranya dengan selalu mengundang ke acara-acara yang diselenggarakan oleh satuan kerja.



4. 2 Perbandingan Kinerja

4.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Tahun Sebelumnya

Tabel 22 Perbandingan target dan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II TA 2022 dan TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET 2021			TARGET 2022			TARGET 2023		
		Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja	Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja	Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni										
1	Jumlah Laporan Penyusunan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2720 Unit	2710 Unit	99.63%	3856 Unit	3799 Unit	98.52%	845 Unit	844 Unit	99.88%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	216 Unit	173 Unit	80.09 %	130 Unit	130 Unit	100%	103 Unit	103 Unit	100%
4	Jumlah Rusun yang dipelihara	-	-	-	2 Tower	2 Tower	100%	7 Tower	7 Tower	100%
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	2122 Unit	496 Unit	23.37%	1627 Unit	1627 Unit	100%	2100 Unit	-	MYC 2023 - 2024
6	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	416 Unit	416 Unit	100%	415 Unit	419 Unit	100.96%	1100 Unit	1168 Unit	106.18%
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan										
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%	2 Layanan	2 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%	2 Layanan	2 Layanan	100%	2 Layanan	2 Layanan	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%	2 Layanan	2 Layanan	100%	2 Layanan	2 Layanan	100%
	TOTAL									

Berdasarkan tabel diatas, pada sasaran kegiatan **Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni**, terdapat peningkatan target Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II di tahun 2023 dibandingkan dengan target 2022 dan 2021, serta pencapaian mengalami peningkatan, terutama pada realisasi bantuan PSU bagi Rumah MBR. Perbedaannya dari tahun sebelumnya adalah adanya Bantuan Rumah Susun yang dipelihara sebanyak 2 Tower di tahun 2022 meningkat menjadi 7 Tower di tahun 2023.

Target dan capaian untuk sasaran kegiatan **Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan** pada tahun ini sama dengan Tahun sebelumnya dengan capaian 100%.

4.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Rencana Jangka Menengah

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	SAT	TARGET FISIK				TOTAL TARGET	CAPAIAN				TOTAL CAPAIAN	KET
			2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II													
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak												
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni												
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni												
	a. Jumlah Laporan Penyusunan Penyediaan Perumahan	Laporan	3	4	4	4	15	3	4	4	4	15	tercapai
	b. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	4650	1050	1080	1620	8400	4400	2710	3799	844	11753	melampaui target
	c. Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN	Unit	600	0	0	0	600	656	0	0	0	656	tercapai
	d. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	42	216	146	230	634	0	173	130	103	406	tidak tercapai
	e. Jumlah Rusun yang dipelihara	Unit	2	3	8	9	22	2	0	2	7	11	tidak tercapai
	f. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	0	30	80	40	150	0	496	1627	0	2123	melampaui target
	g. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Tower	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tidak terlokasi
	h. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	0	500	687	875	2062	0	416	415	1168	1999	tidak tercapai
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
SS 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis lainnya												
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya												
SK	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan												
	a. Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	4	1	2	2	1	6	melampaui target
	b. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	4	1	2	2	2	7	melampaui target
	c. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	4	1	2	2	2	7	melampaui target

Tabel 23. Perbandingan Target Kinerja terhadap Rencana Jangka Menengah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II sampai dengan tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan antara target PK dengan target renstra 2023 terjadi penurunan maupun kenaikan target pada beberapa indikator kinerja.

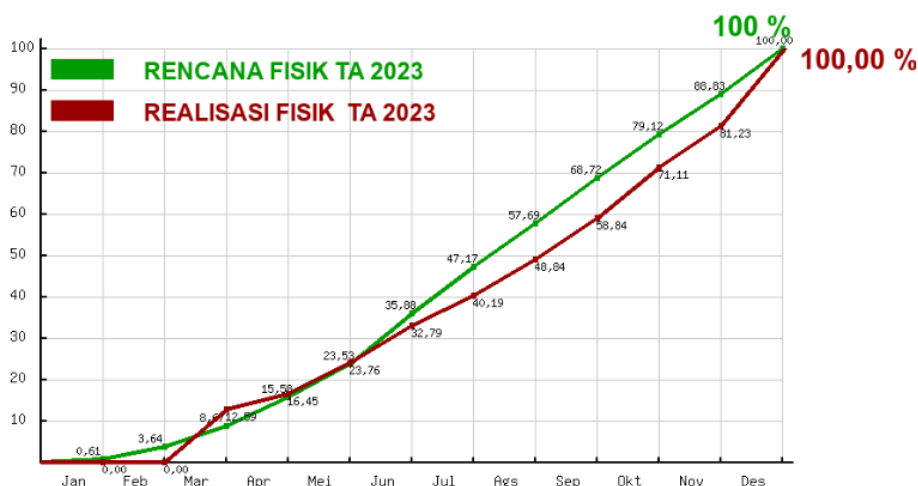
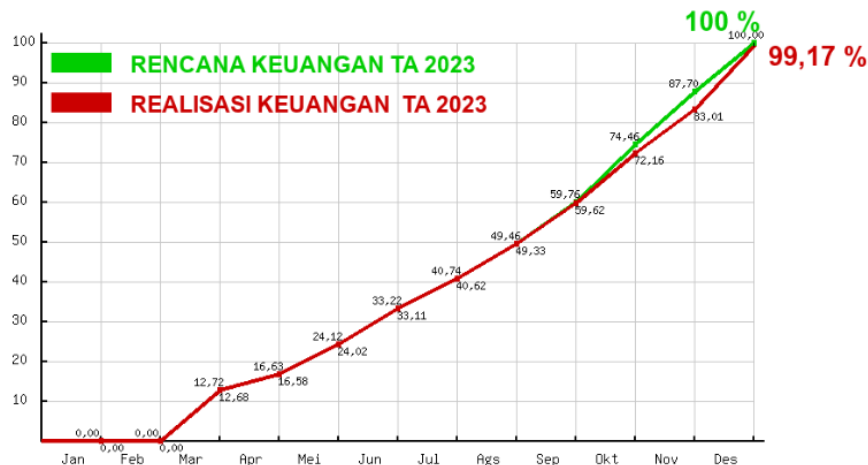
Penurunan target terjadi pada indikator **Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya** dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. namun secara pencapaian indikator BPS melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Balai P2P NTII. sedangkan Indikator **Jumlah Rumah Susun yang dibangun** tidak memenuhi target Renstra dikarenakan pada tahun 2020 terjadi refofusing anggaran sehingga tidak dialokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud, untuk indikator **Jumlah rumah susun yang dipelihara** juga tidak memenuhi target renstra karena pada tahun 2021 tidak dialokasikan anggaran untuk kegiatan revitalisasi rumah susun, sementara Indikator **Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan PSU** juga tidak memenuhi target renstra karena pada tahun 2020 tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut.

4.3. Realisasi Anggaran

4.3.1 Realisasi Anggaran

Berikut merupakan realisasi anggaran yang telah dicapai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II selama TA 2023:

A. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II



Uraian	Keuangan Tahun Anggaran 2023											
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Renc. e-Mon	0	0	12,72	16,63	24,12	33,22	40,74	49,46	59,76	74,46	87,7	100
Realisasi. Keu	0	0	12,68	16,58	24,02	33,11	40,62	49,33	59,62	72,16	83,01	99,17
Deviasi	0	0	-0,04	-0,05	-0,1	-0,11	-0,12	-0,13	-0,14	-2,3	-4,69	-0,83

Uraian	Fisik Tahun Anggaran 2023											
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Renc. e-Mon	0,61	3,64	8,67	15,58	23,53	35,88	47,17	57,69	68,72	79,12	88,83	100
Realisasi. Keu	0	0	12,59	16,45	23,76	32,79	40,19	48,84	58,84	71,11	81,23	100
Deviasi	-0,61	-3,64	3,92	0,87	0,23	-3,09	-6,98	-8,85	-9,88	-8,01	-7,6	0

Tabel 24.. Realisasi Keuangan dan Fisik per bulan di TA. 2023

Kondisi pada bulan Januari 2023 di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki permasalahan yang sama yaitu kinerja yang terindikasi <30% yaitu 0,00% baik dari segi keuangan maupun fisik. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- kegiatan belum dapat dilakukan realisasi karena masih adanya revisi anggaran yang mempengaruhi pagu;
- belum adanya surat keputusan yang menyatakan bahwa pejabat perbendaharaan lama dapat melakukan realisasi anggaran;

4.3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya mengenai perbandingan capaian di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II antara TA 2022 dengan TA 2023, telah dapat terlihat bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan pada capaian yang diraih pada tahun ini.

Dalam mencapai hal tersebut tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah ketersediaan dan potensi dari sumber daya yang ada. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya yaitu pada Bab III mengenai Kapasitas Organisasi, telah dijelaskan mengenai Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana; serta DIPA.

Secara sumber daya Manusia, pada tahun 2023 terdapat dinamika yang terjadi pada lingkungan balai, diantaranya penambahan, pergantian dan rolling pegawai antar satuan kerja, yang secara tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan ini.

Secara penyediaan sarana dan prasarana, pada tahun 2022 juga terjadi penambahan secara signifikan diantaranya pengadaan barang untuk perkantoran maupun dalam upaya mewujudkan Zona Integritas.



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II tahun 2023 merupakan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas kinerja. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II dalam melaksanakan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yakni : (1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; (2) Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; (3) Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; (6) Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; (7) Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana; (8) Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian; (9) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; (10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Penyusunan laporan kinerja ini telah mengacu pada dokumen Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II 2020-2024, DIPA Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II. Pencapaian Tahun 2023 tentu tidak terlepas dari sejumlah persoalan, Beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Revisi anggaran yang sering terjadi serta pemblokiran pada akun-akun yang menghambat terealisasinya kegiatan;
2. Peningkatan koordinasi antar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. NTT untuk meminimalisir penyesuaian program serta permasalahan dalam pelaksanaan program.
3. Penyediaan lahan oleh Pemda belum maksimal sesuai kebutuhan penyediaan perumahan, sehingga pada pelaksanaan juga diproses penyediaan lahan secara paralel.

4. Permasalahan Sosial Masyarakat terkait lahan sering terjadi pemblokiran lahan dan penghentian pelaksanaan pekerjaan.

5.2 Tindak Lanjut

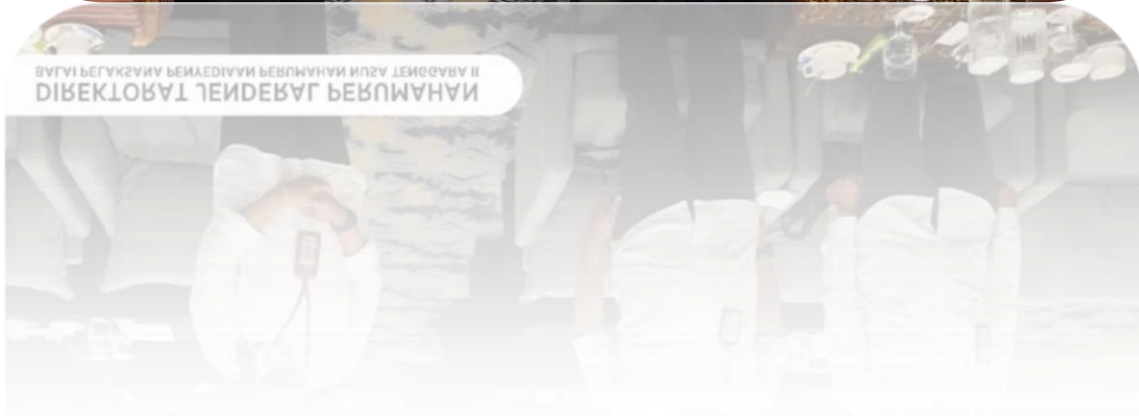
Agar tujuan dan sasaran dari penyusunan LAKIN ini dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya, maka ada beberapa hal yang menjadi tindak lanjut permasalahan yang ada agar kedepannya dapat meminimalisir hambatan pencapaian tujuan, diantaranya :

1. Meningkatkan Penerapan SMAP, ZI, UKI, MR dan SPIP serta Pemberlakuan sistem reward and punishment dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja.
2. Melakukan upaya peningkatan kebersamaan serta koordinasi di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah agar produk yang dihasilkan dapat tercapai outcome-nya
4. Melakukan perencanaan kegiatan secara berkala, advokasi dan sosialisasi kegiatan PKP kepada Pemda dan Masyarakat calon penerima bantuan.
5. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) konstruksi serta norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai P2P NTII.

Demikian Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 ini disusun. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak, khususnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan.



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

LAMPIRAN

Penghargaan yang diterima Balai Perumahan Nusa Tenggara II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. NTT



SMAP


Sistem Manajemen Anti Penyuapan



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PADA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

1. Melarang Penyuapan dan Sejenisnya di Lingkungan Organisasi;
2. Mematuhi Peraturan perundang-undangan yang Berlaku Terkait dengan Anti Penyuapan;
3. Menyelaraskan Kebijakan Anti Penyuapan dengan Tujuan Organisasi;
4. Menyediakan Kerangka Kerja Untuk Menetapkan, Meninjau dan Mencapai Sasaran Anti Penyuapan;
5. Memastikan Komitmen Untuk Memenuhi Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian Anti Penyuapan Kepada Stakeholder Terkait;
7. Menjalankan Peningkatan Berkelanjutan Dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan Tanggungjawab, Kewenangan dan Kemandirian Kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
9. Memberikan Sanksi Tegas Kepada Pelanggar Ketentuan Kebijakan Anti Penyuapan.

 BalaiPerumahan Ntt  pupr_perumahan_nt2  PUPR_Perumahan_NTT

 BalaiPerumahan Ntt  pupr_perumahan_nt2  PUPR_Perumahan_NTT

Kebijakan Anti Penyuapan

9. Memberikan Sanksi Tegas Kepada Pelanggar Ketentuan

Kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);

8. Memberikan Tanggungjawab, Kewenangan dan Kemandirian Kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);

Manajemen Anti Penyuapan;

7. Menjalankan Peningkatan Berkelanjutan Dalam Sistem

Manajemen Anti Penyuapan;

SNI ISO 9001:2015

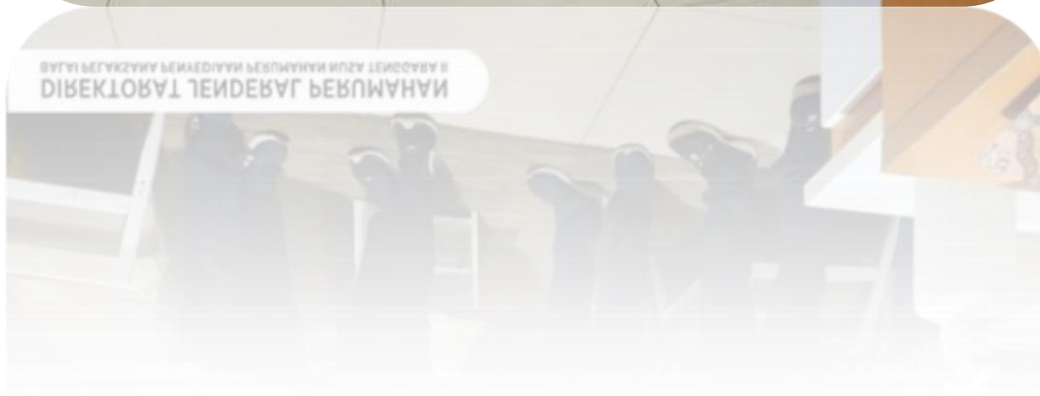
Audit Mutu Internal Kegiatan Bantuan PSU Tahun 2023



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA II

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN





BERITA ACARA KESEPAKATAN
CAPAIAN *OUTPUT* PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN,
RUMAH KHUSUS, RUMAH SWADAYA, DAN BANTUAN PSU
TAHUN 2023

Rapat : Finalisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, dan Bantuan PSU Tahun 2023

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Januari 2024

Pimpinan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

Peserta : 1. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (03-01-2024) telah dilaksanakan Pembahasan Finalisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, dan Bantuan PSU Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Pembangunan dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023 :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	103	103	100 %
	Jumlah rumah khusus yang dibangun	2100*	-	* MYC 2022-2023 dan dilanjutkan MYC 2023-2024
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	845	844	99.88 %
	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1100	1168	106.18 %

Demikian Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, dan Bantuan PSU Tahun 2023 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Tahun 2023.

Kupang, 3 Januari 2024

Disampaikan oleh:

Kepala Satuan Kerja PP
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Bastin Yungga Angguniko, ST. MM
NIP. 198201092008011011

Disetujui oleh:

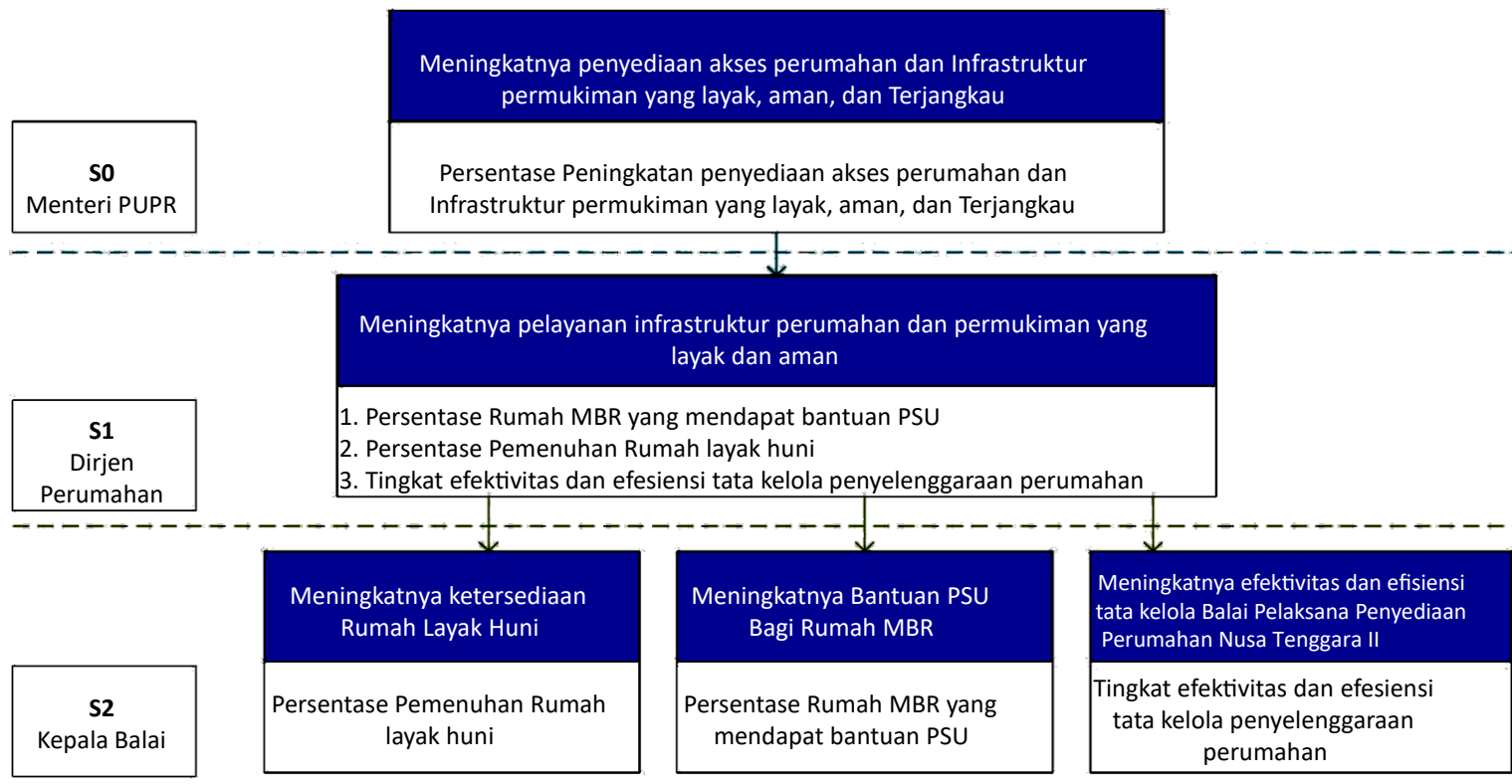
Kepala Balai P2P
Nusa Tenggara II



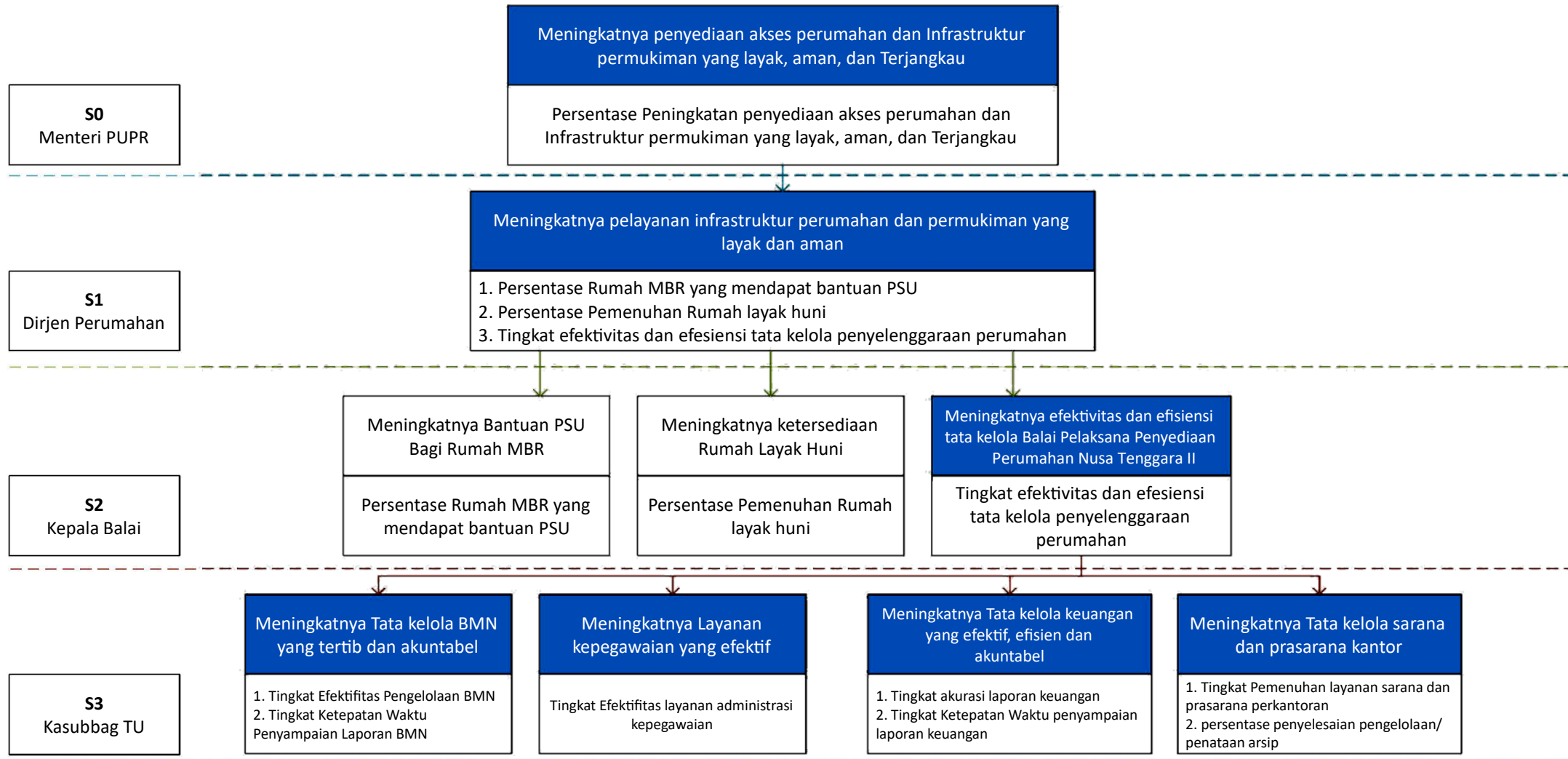
Yubina D. Bunga, ST., MT
NIP. 197005221999032003



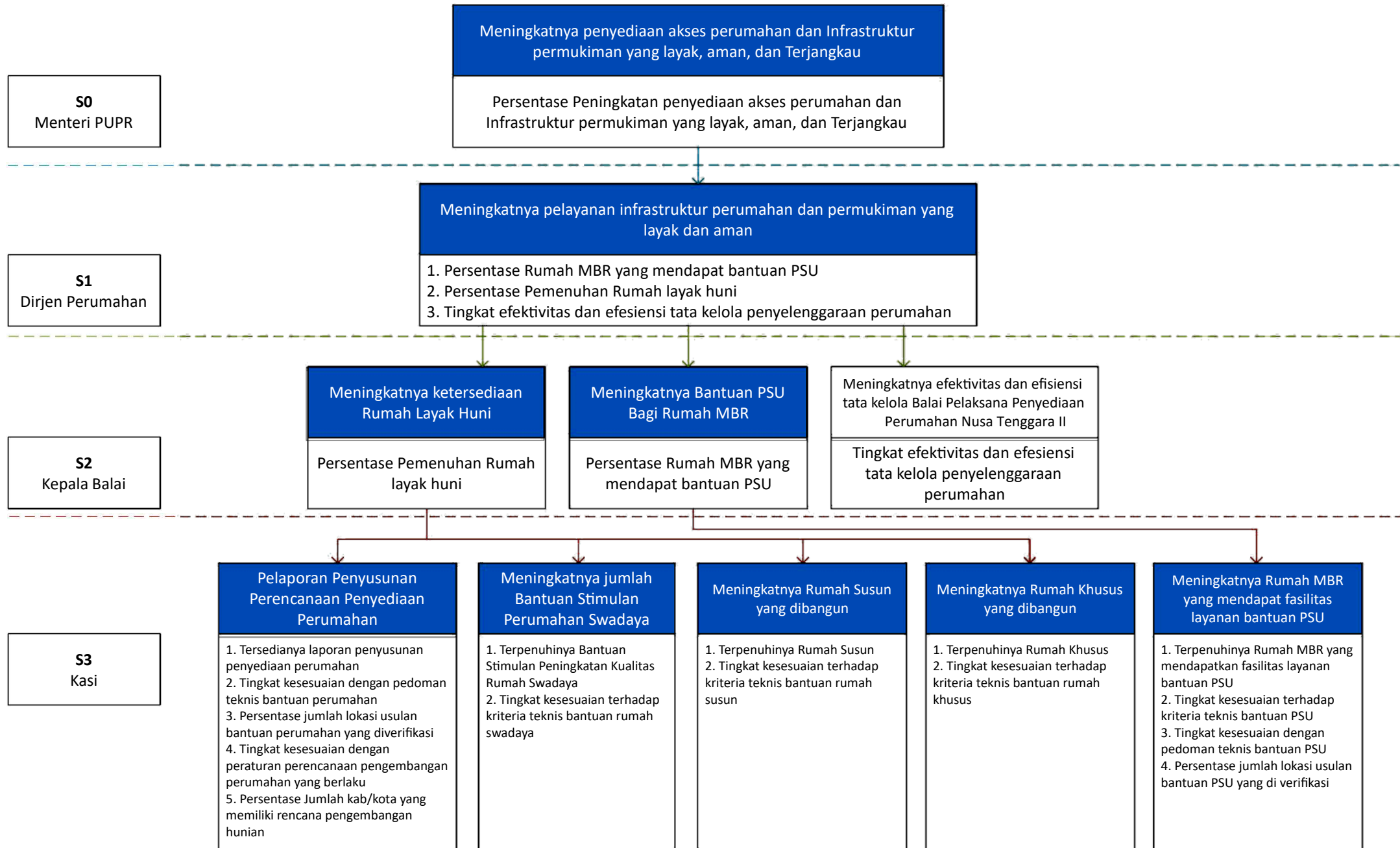
KEPALA BALAI



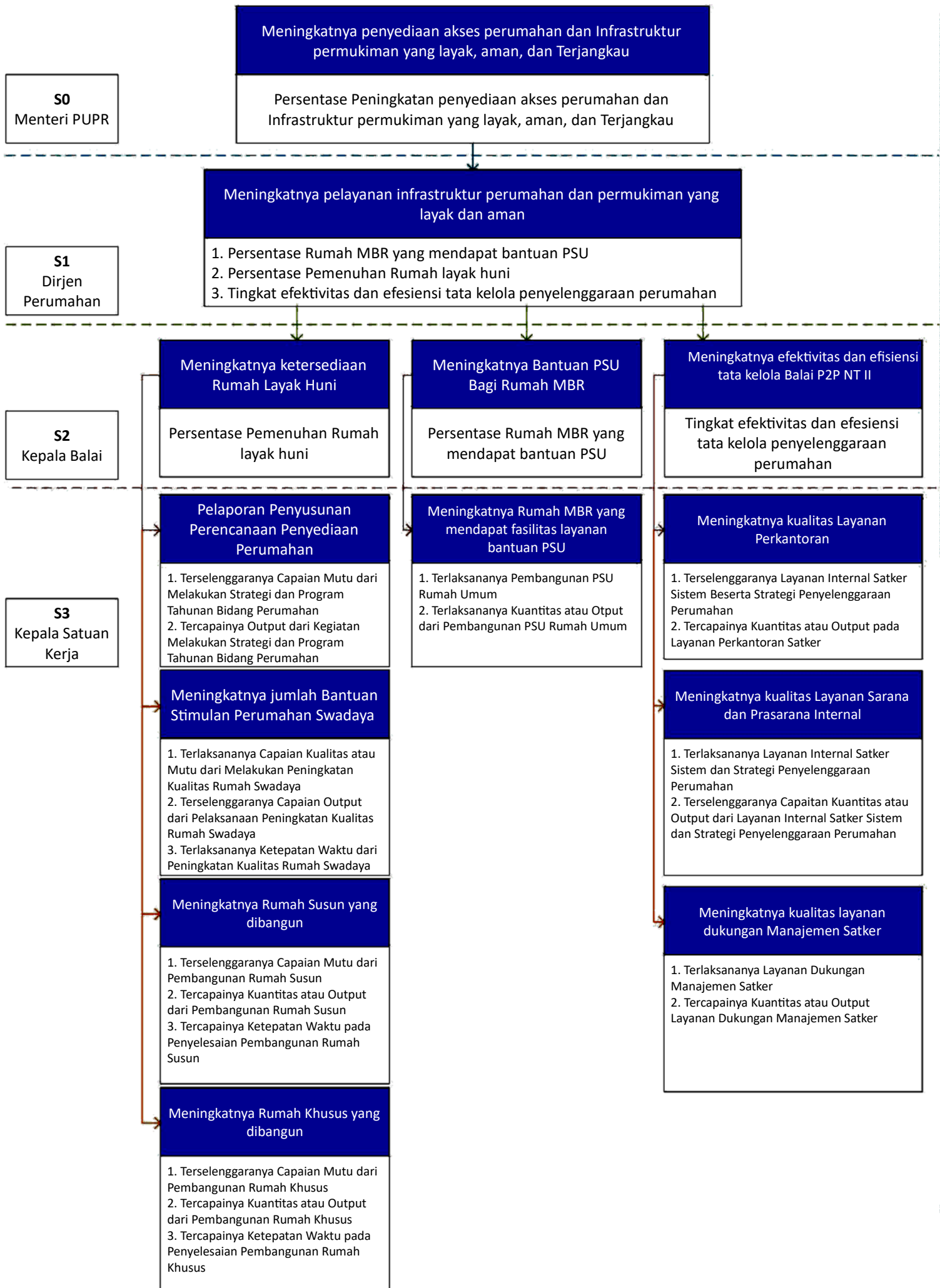
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA



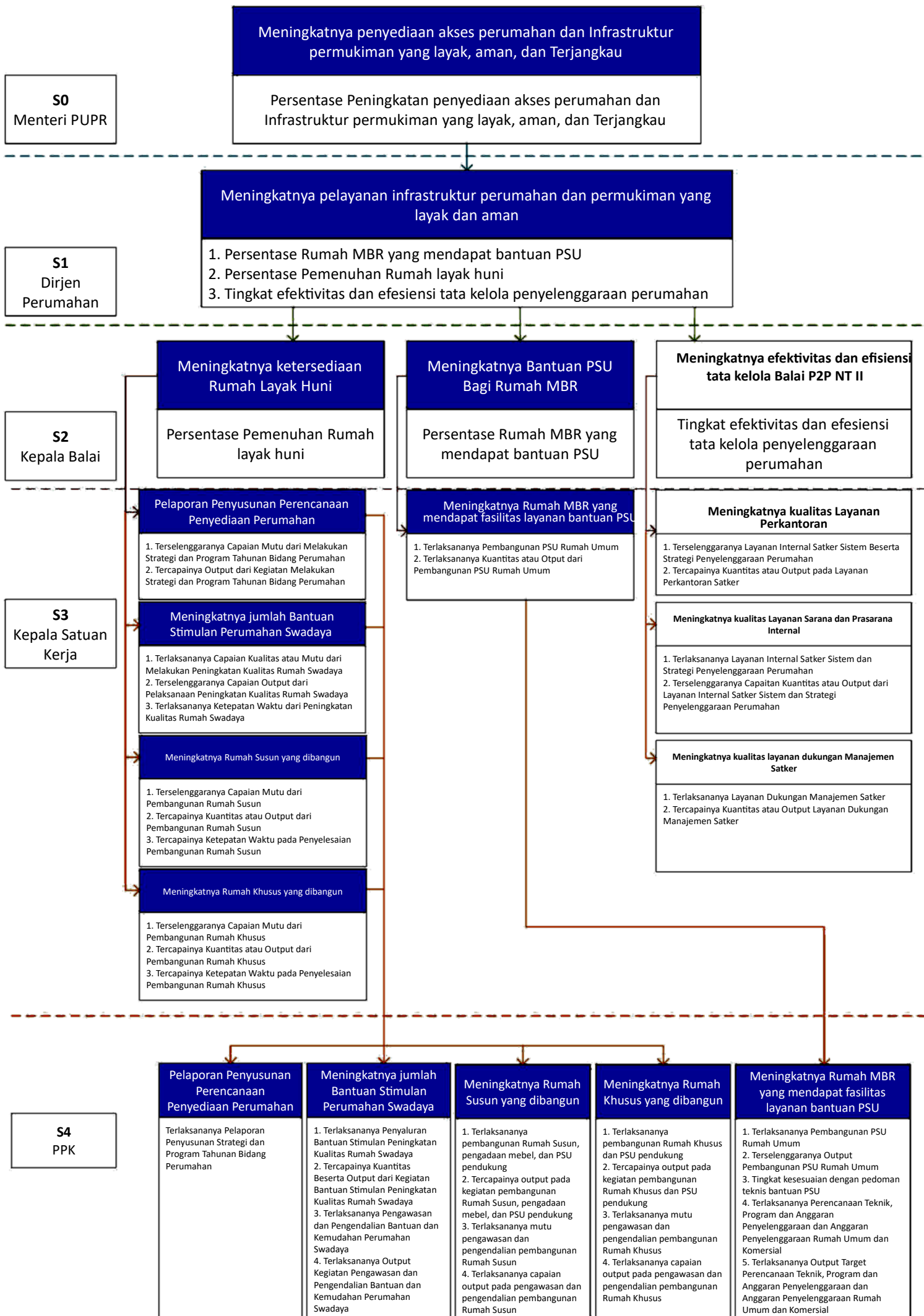
KEPALA SEKSI WILAYAH



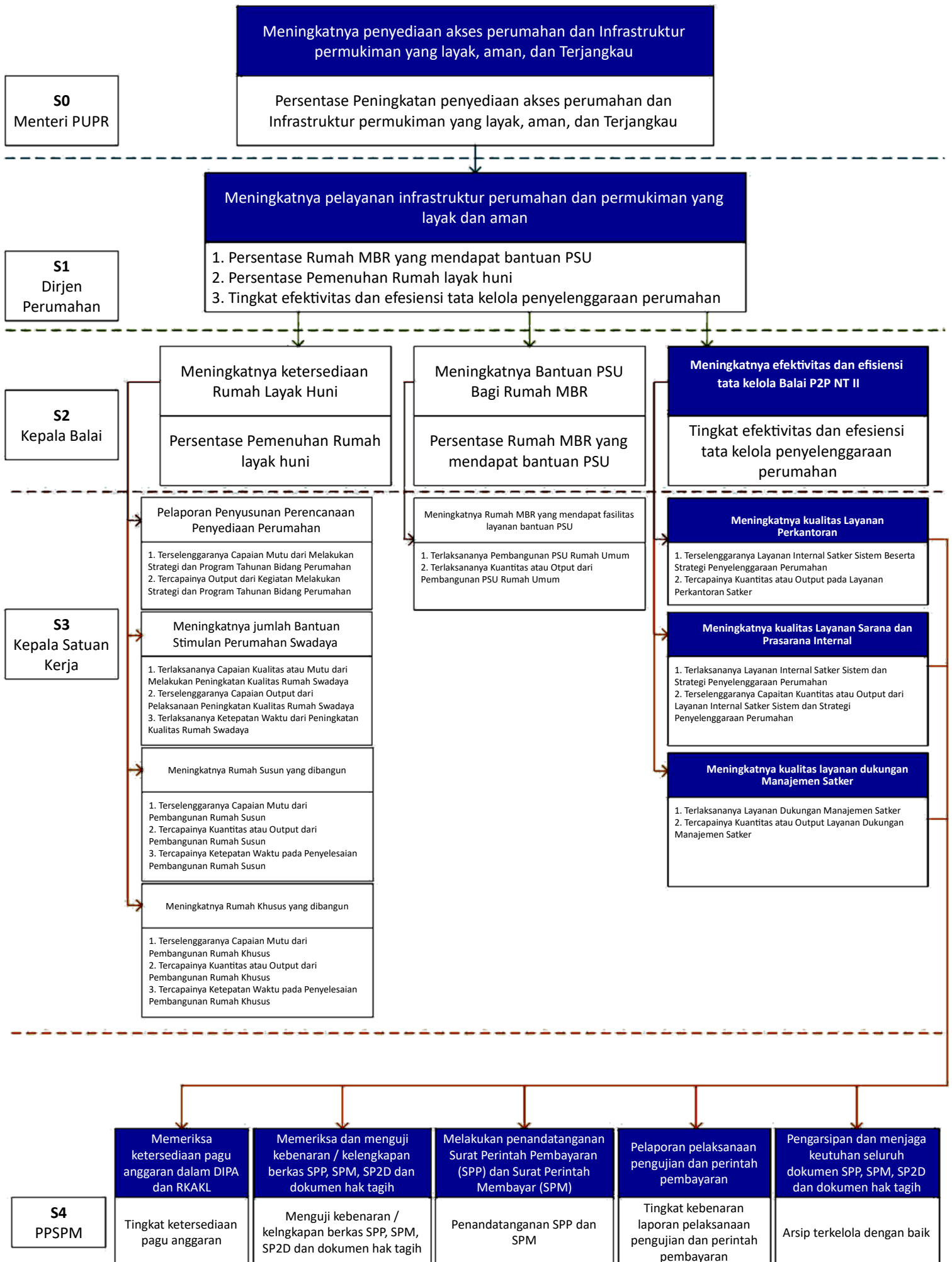
KEPALA SATUAN KERJA



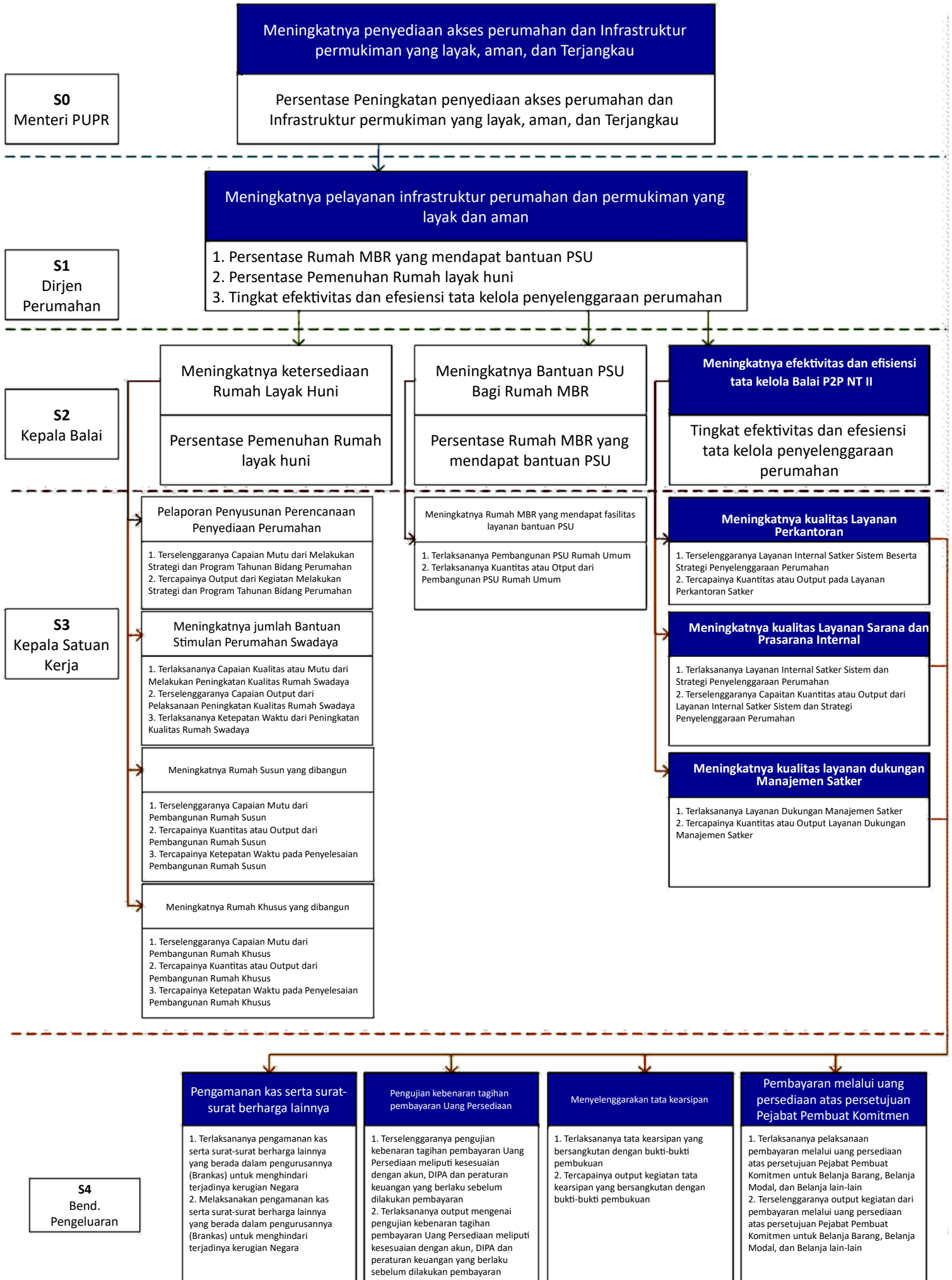
PPK SATUAN KERJA



PPSPM SATUAN KERJA



BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA



PPK BALAI

S0
Menteri PUPR

Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan Infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan Terjangkau

Persentase Peningkatan penyediaan akses perumahan dan Infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan Terjangkau

S1
Dirjen Perumahan

Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman

1. Persentase Rumah MBR yang mendapat bantuan PSU
2. Persentase Pemenuhan Rumah layak huni
3. Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan

S2
Kepala Balai

Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni

Persentase Pemenuhan Rumah layak huni

Meningkatnya Bantuan PSU Bagi Rumah MBR

Persentase Rumah MBR yang mendapat bantuan PSU

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola Balai P2P NT II

Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan

S3
Kasi

Pelaporan Penyusunan
Perencanaan Penyediaan
Perumahan

1. Tersedianya laporan penyusunan penyediaan perumahan
2. Tingkat kesesuaian dengan pedoman teknis bantuan perumahan
3. Persentase jumlah lokasi usulan bantuan perumahan yang diverifikasi
4. Tingkat kesesuaian dengan peraturan perencanaan pengembangan perumahan yang berlaku
5. Persentase Jumlah kab/kota yang memiliki rencana pengembangan hunian

Meningkatnya jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Terpenuhiya Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
2. Tingkat kesesuaian terhadap kriteria teknis bantuan rumah swadaya

Meningkatnya Rumah Susun yang dibangun

1. Terpenuhiya Rumah Susun
2. Tingkat kesesuaian terhadap kriteria teknis bantuan rumah susun

Meningkatnya Rumah Khusus yang dibangun

1. Terpenuhiya Rumah Khusus
2. Tingkat kesesuaian terhadap kriteria teknis bantuan rumah khusus

Meningkatnya Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU

1. Terpenuhiya Rumah MBR yang mendapatkan fasilitas layanan bantuan PSU
2. Tingkat kesesuaian terhadap kriteria teknis bantuan PSU
3. Tingkat kesesuaian dengan pedoman teknis bantuan PSU
4. Persentase jumlah lokasi usulan bantuan PSU yang di verifikasi

S4
PPK

Meningkatnya jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Terlaksananya Penyaluran Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
2. Tercapainya Kuantitas Beserta Output dari Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
3. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya
4. Terlaksananya Output Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya

Meningkatnya Rumah Susun yang dibangun

1. Terlaksananya pembangunan Rumah Susun, pengadaan mebel, dan PSU pendukung
2. Tercapainya output pada kegiatan pembangunan Rumah Susun, pengadaan mebel, dan PSU pendukung
3. Terlaksananya mutu pengawasan dan pengendalian pembangunan Rumah Susun
4. Terlaksananya capaian output pada pengawasan dan pengendalian pembangunan Rumah Susun

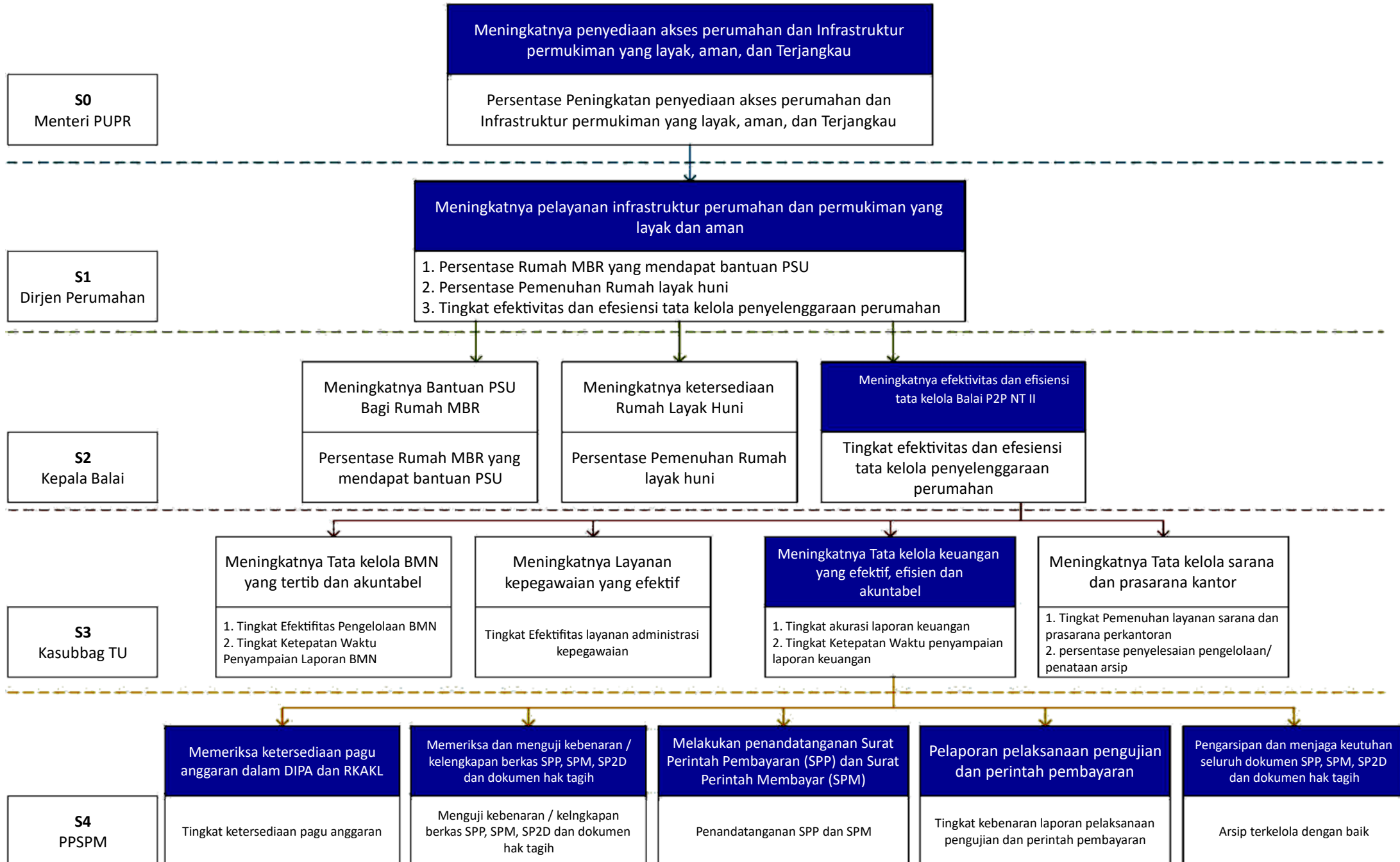
Meningkatnya Rumah Khusus yang dibangun

1. Terlaksananya pembangunan Rumah Khusus dan PSU pendukung
2. Tercapainya output pada kegiatan pembangunan Rumah Khusus dan PSU pendukung
3. Terlaksananya mutu pengawasan dan pengendalian pembangunan Rumah Khusus
4. Terlaksananya capaian output pada pengawasan dan pengendalian pembangunan Rumah Khusus

Meningkatnya Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU

1. Terlaksananya Pembangunan PSU Rumah Umum
2. Terselenggaranya Output Pembangunan PSU Rumah Umum
3. Tingkat kesesuaian dengan pedoman teknis bantuan PSU
4. Terlaksananya Perencanaan Teknik, Program dan Anggaran Penyelenggaraan dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial
5. Terlaksananya Output Target Perencanaan Teknik, Program dan Anggaran Penyelenggaraan dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial

PPSPM BALAI



BENDAHARA PENGELUARAN BALAI

Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan Infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan Terjangkau

Persentase Peningkatan penyediaan akses perumahan dan Infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan Terjangkau

S0
Menteri PUPR

Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman

1. Persentase Rumah MBR yang mendapat bantuan PSU
2. Persentase Pemenuhan Rumah layak huni
3. Tingkat efektivitas dan efesiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan

S1
Dirjen Perumahan

Meningkatnya Bantuan PSU Bagi Rumah MBR

Persentase Rumah MBR yang mendapat bantuan PSU

Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni

Persentase Pemenuhan Rumah layak huni

Meningkatnya efektivitas dan efesiensi tata kelola Balai P2P NT II

Tingkat efektivitas dan efesiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan

S2
Kepala Balai

Meningkatnya Tata kelola BMN yang tertib dan akuntabel

1. Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN
2. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMN

Meningkatnya Layanan kepegawaian yang efektif

Tingkat Efektifitas layanan administrasi kepegawaian

Meningkatnya Tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

1. Tingkat akurasi laporan keuangan
2. Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian laporan keuangan

Meningkatnya Tata kelola sarana dan prasarana kantor

1. Tingkat Pemenuhan layanan sarana dan prasarana perkantoran
2. persentase penyelesaian pengelolaan/ penataan arsip

S3
Kasubbag TU

Pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya

1. Terlaksananya pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara
2. Melaksanakan pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara

Pengujian kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan

1. Terselenggaranya pengujian kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran
2. Terlaksananya output mengenai pengujian kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran

Menyelenggarakan tata kearsipan

1. Terlaksananya tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan
2. Tercapainya output kegiatan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan

Pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen

1. Terlaksananya pelaksanaan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja lain-lain
2. Terselenggaranya output kegiatan dari pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja lain-lain

S4
Bend. Pengeluaran

Mengetahui,
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Nusa Tenggara II



Yublina D. Bunga, ST, MT
NIP. 197005221999032003